



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2022**

disampaikan oleh :  
**BAPPELITBANGDA  
T.A 2023**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa baratuH

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhana WaTa'ala, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

LKIP Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, dan juga dapat digunakan sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta penjelasan atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Besar harapan bahwasanya Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi atau bahan evaluasi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi demi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 2023

Bappelitbangda  
Provinsi Sulawesi Selatan.  
Kepala,

  
**Ir. Andi Darmawan Bintang, MDevPlg**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19670427 199303 1 015

Bab I :

1. Pohon Kinerja
2. Cascading Kinerja
3. Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
4. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
5. Susunan Organisasi
6. Isu-Isu Strategis
7. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran
8. Tindak Lanjut atas LHE Sakip

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai institusi pemerintah daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/ atau APBN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

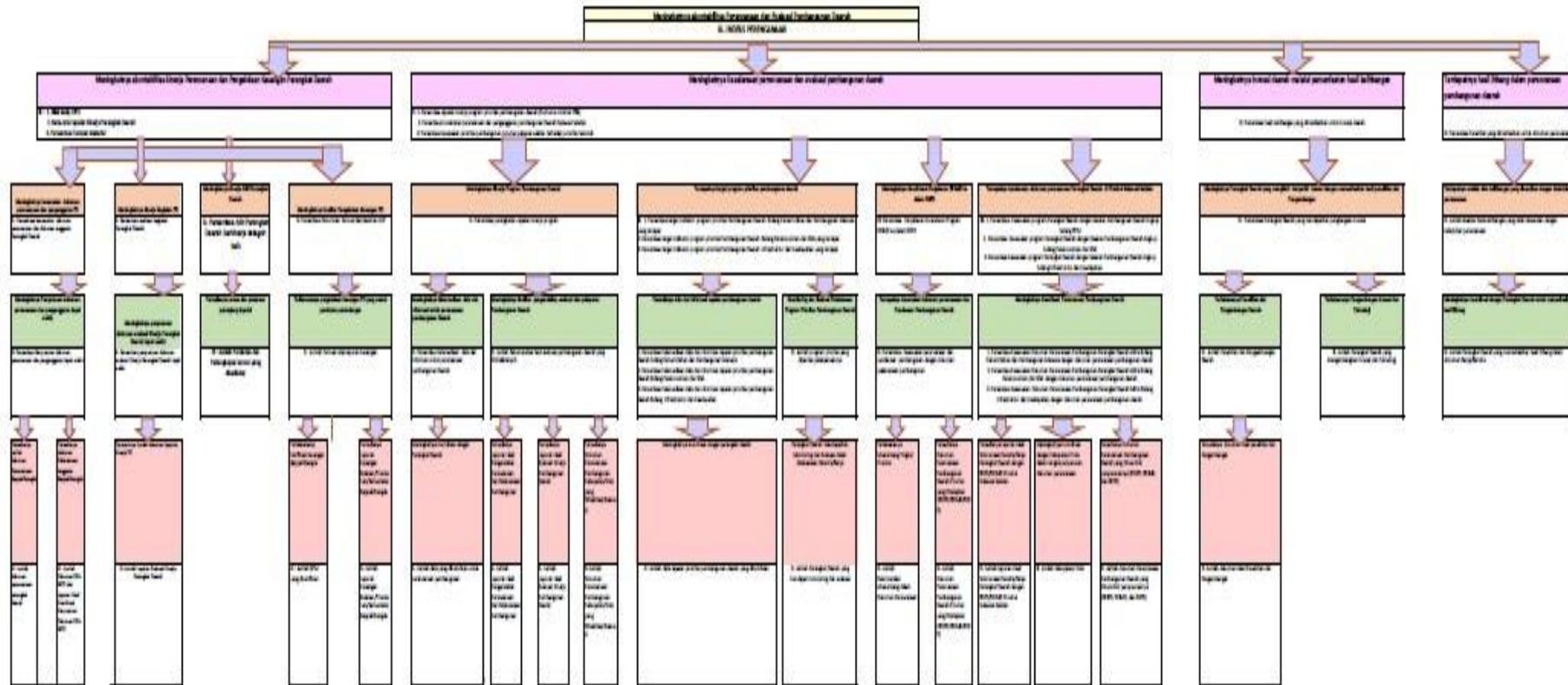
Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **1.1. POHON KINERJA**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda

Nomo 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Serta berdasarkan Permenpan RB Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyusun pohon kinerja berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dengan menentukan hasil yang akan dicapai dengan menurunkan Critical Success Factor (CSF). Adapun Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Pohon Kinerja Bappelitbangda



1.2. Cascading Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, Bappelitbangda Menyusun Cascading Kinerja berdasarkan perjenjangan kinerja dengan menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Cascading Kinerja Bappelitbangda

Visi	Misi	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR	Penanggung Jawab
SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER	Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		- Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah - Nilai SAKIP OPD - Persentase Temuan Material	Gubernur Sulawesi Selatan  Kepala Badan
					PROGRAM PENULISAN LERUSAN PEMERINTAH DAERAH-PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Perangkat Daerah Persentase Realisasi Rencana Perangkat Daerah Persentase AGN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik Persentase Pemenuhan Temuan Berdasarkan LUP	Sekretaris
					Pencapaian Penganggaran dan Disalut Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penganggaran dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu Persentase penyelesaian dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kepala Sub Bagian Program
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Terselut Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Unitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Temuan atau laporan keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan
					Perencanaan Cap dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Cap dan Tunjangan ASN	
					Perencanaan Pembekalan dan Pengadaan/akuisisi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembekalan dan Pengadaan/akuisisi Keuangan SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
					Penyusunan Perencanaan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD	
					Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio nilai hasil perilaku pegawai Perangkat Daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
					Pengadaan Pakaian Dinas Daerah/Abjad Keagamaan	Jumlah Pakaian Dinas Daerah/ Abjad Keagamaan	
					Pengadaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	
					Pengadaan dan Pembelian Program Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Program Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pembelian dan Pembelian	
					Monev/ Tindak Lanjut/ Evaluasi/ Pembelian Perencanaan/ Perubahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Monev/ Tindak Lanjut/ Evaluasi/ Pembelian Perencanaan/ Perubahan	

1	2	3	4	5	6	7	8
Visi	Misi	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR	Penanggung Jawab
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	
					Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kepala Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Slaye Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Slaye Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	
					Pemeliharaan/Renabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
					Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
				Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	Kepala Badan
						Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah (Outcome minimal 75%)	
						Persentase kesesuaian prioritas pembangunan provinsi sulawesi selatan terhadap prioritas nasional	
					PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	Persentase peningkatan capaian kinerja program	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD	
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Necessarian perencanaan dan pendanaan pembangunan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	Sub Koordinator
					Koordinasi Pemetaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Tahapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Koordinasi Penyusunan dan Pemetaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Diteapkan (RPJPD/RPJMD/RPKD)	
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Sub Koordinator
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Matriks Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Sertua Perencanaan Pembangunan Daerah)	

Visi	Misi	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR	Penanggung Jawab
					Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
					Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaitan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
					Facilitasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Disetujui/Disetujui	
					<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>
					Persentase target indikator program prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai		
					Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM		
					Persentase target indikator program prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Manusia yang tercapai		<b>KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOA</b>
					Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Manusia		
					Persentase target indikator program prioritas Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai		<b>KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>
					Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketersediaan data dan informasi capaian pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<b>Sub Koordinator</b>
						Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RPJPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Disetujui/Disetujui (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergisitas Harmonisasi dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD/RPJMD dan RPJPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Disetujui/Disetujui (RPJPD, RPJMD dan RPJPD)	
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinergisitas Harmonisasi dengan RPJPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	

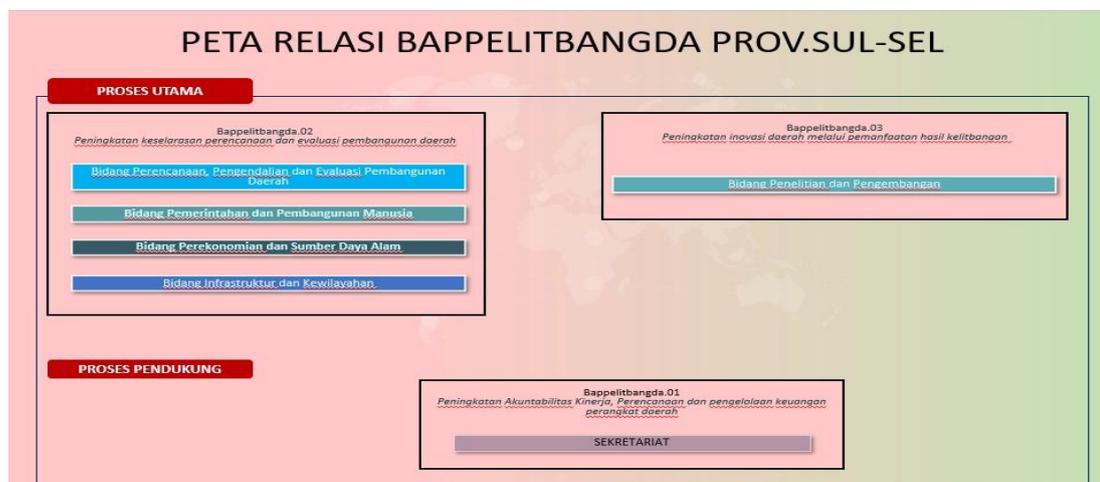
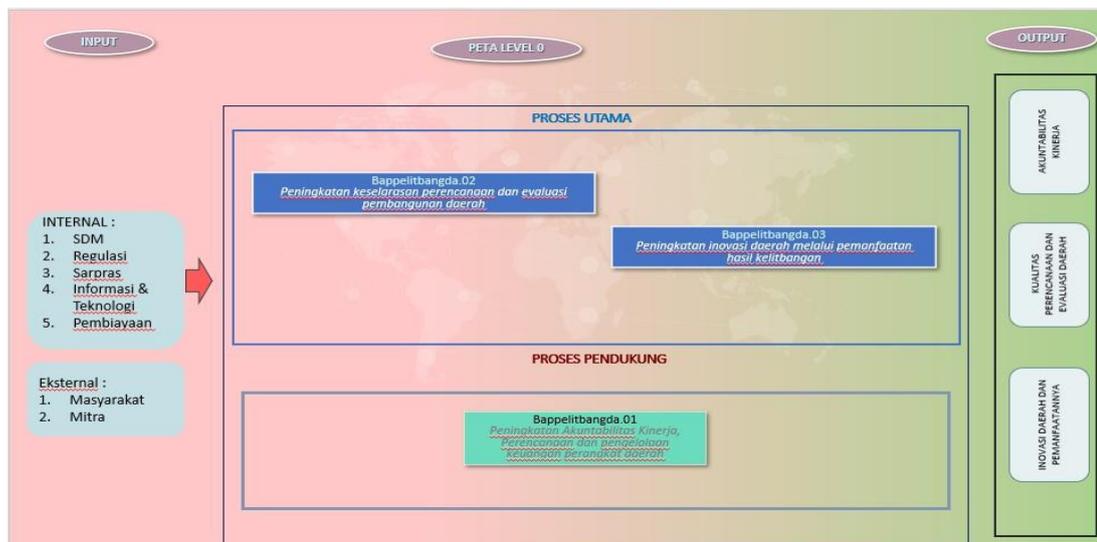
1	2	3	4	5	6	7	8	
Visi	Misi	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR	Penanggung Jawab	
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Ketersediaan data dan informasi capaian pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA	Sub Koordinator	
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD RPJMD dan RKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra bidang Perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan		
					Realisasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Perekonomian		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Perekonomian		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disinkronisasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
					Realisasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang SDA		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Sub Koordinator	
					E.1.08.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketersediaan data dan informasi capaian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Disinkronisasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
					Realisasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Infrastruktur		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan RPJPD RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Disinkronisasi (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
					Realisasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Renja Bidang Kewilayahan	Gubernur Sulawesi Selatan	
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik					
				Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelibangan		Persentase hasil kelibangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah		Kepala Badan

Visi	Misi	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Sub Koordinator
					Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
					Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa dan Pengkajian Peraturan	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Sub Koordinator
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
					Penelitian dan Pengembangan Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Sub Koordinator
					Penelitian dan Pengembangan Perbenihan Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perbenihan, Perkebunan dan Pangan	
					Penelitian dan Pengembangan Keluhan dan Perikatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluhan dan Perikatan	
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengembangkan inovasi dan Teknologi	Sub Koordinator
					Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Diemihasi Jenis Proedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diemihasi Jenis, Proedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Sosialisasi dan Diemihasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diemihasi Hasil-Hasil Kelibangan	
					Facilitasi Hasil Kelayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi Hasil Kelayaan Intelektual	

### 1.3. Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Peta Proses bisnis adalah sebuah acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan kinerja. Hal tersebut, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka terkait hal tersebut Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Gambaran Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Prov. Sulsel**



#### **1.4. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sebagai bentuk konsekuensi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian dengan adanya penyederhanaan birokrasi di pemerintah Sulawesi selatan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Penyederhaan Struktur Birokrasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 bahwasanya Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok**

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### **3. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.5. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sejak Tahun 1982 yang telah mengalami penyempurnaan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Susunan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka nomenklatur sub bidang pada Bappelitbangda berubah menjadi subkoordinator. Adapun susunan organisasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi, sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
  3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dalam bagan berikut :

**Gambar 1.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

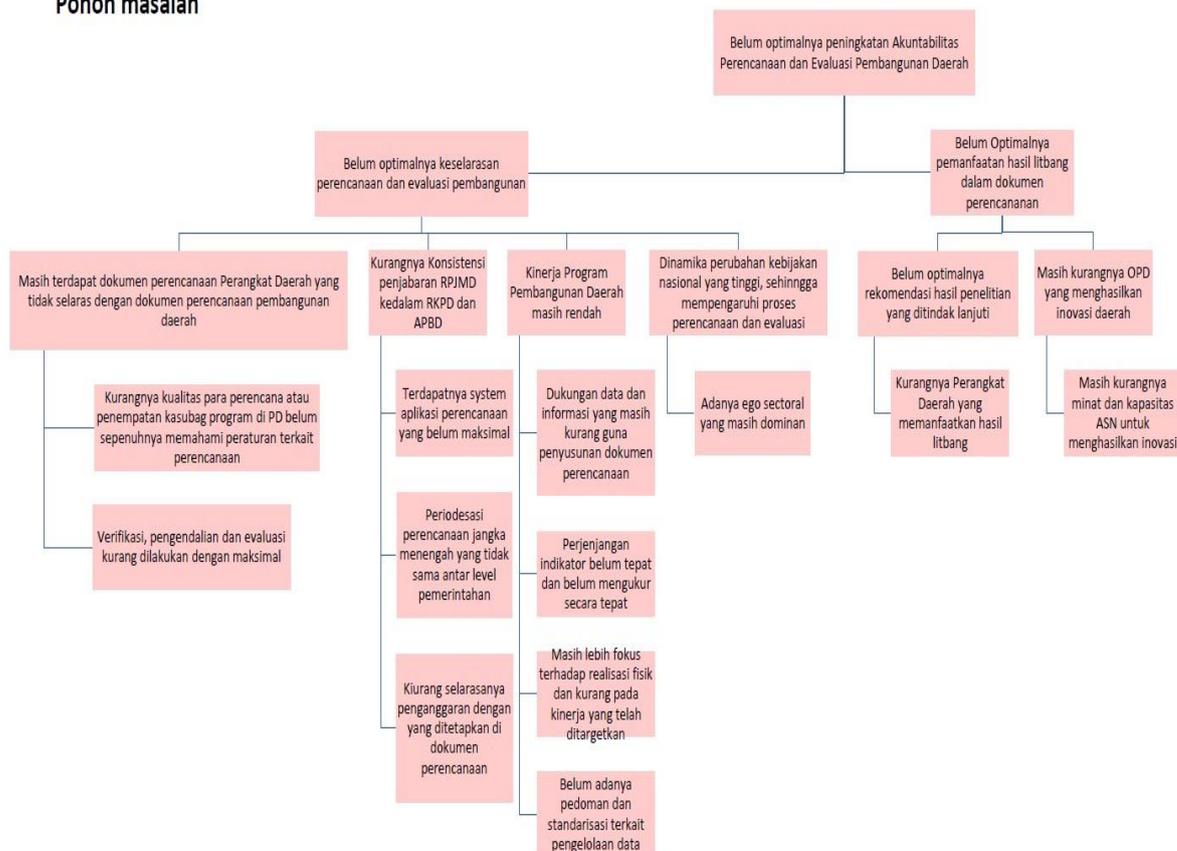


1.6. ISU ISU STRATEGIS

Keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut dapat mengetahui dan merespon permasalahan yang didapat dengan berbagai kebijakan dan Tindakan yang tepat. Kemudian isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan dua urusan yakni urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2022, rumusan permasalahan Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

Pohon masalah



Dengan demikian isu-isu strategis Bappelitbangda adalah

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
2. Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

### 1.7. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2022, jumlah pegawai Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 184 orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

**Tabel 1.1. Jumlah Pegawai menurut Jabatan, Kualifikasi dan Jenis Kelamin Data Desember 2022**

No.	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
<b>A. Jabatan Struktural</b>					
1.	Esselon 2	1	S2	1	
2.	Esselon 3	6	S2 : 5 S1: 1	5	1
3.	Esselon 4	3	S2 : 2 S1: 1	2	1
<b>B. Jabatan Pelaksana Substantif</b>					
1.	Analisis	62	S2:18 S1:33 D4:11	34	28
2.	Bendahara	1	S1: 1		1
3.	Penyusun	12	S2: 2 S1: 10	7	5
4.	Penata	4	S1:4	2	2
5.	Penelaah	0	0	0	0
6.	Verifikator	1	S1:1	1	
<b>C. Fungsional Tertentu</b>					
1.	Perencana	39	S3:1 S2:32 S1:6	18	21
2.	Peneliti	8	S2 : 2 S1:6	3	5
3.	Analisis Kebijakan	3	S3:1 S2:2	2	1
4.	Perekayasa	2	S2:2	1	1
5.	Pustakawan	2	S1:2		2
6.	Arsiparis	8	S2:1 S1:7	2	6
7.	Analisis SDM	1	S1:1		1
7.	Pranata	3	S2:3	1	2
<b>D. Jabatan Pelaksana Pendukung/Administratif</b>					
1	Pengelola	1	SMA : 1	1	0
2.	Pengadministrasi	21	S1: 2 SMA:19	18	3
3.	juru	1	SD : 1	1	0

No.	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
4.	pramu	1	SD : 1	1	0
5.	Pengemudi	1	SD : 1	1	0

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. Bappelitbangda Prov. Sulsel 2022

Berdasarkan tabel diatas, sumber daya manusia Bappelitbangda sudah cukup memadai, dengan Pendidikan tertinggi adalah S3 (Doktor) dan Pendidikan terendah adalah SD (Sekolah Dasar). Adapun Pegawai dengan jabatan S3 mengisi jabatan structural, pelaksana substatif dan fungsional tertentu, sedangkan untuk SD mengisi jabatan pelaksana pendukung/administrative. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 101 orang atau 56% dari jumlah total pegawai, dan pegawai perempuan berjumlah 80 orang atau 44% dari jumlah total pegawai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran, sesuai rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Jumlah Aset pada Bappelitbangda Prov Sulsel per 31 Desember 2022**

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	3	1	TANAH	1	534,597,040.00	
			a. Tanah	1	534,597,040.00	
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN	2850	22,580,720,324.00	
			a. Alat Besar			
			b. Alat Angkutan	60	5,119,928,200.00	
			c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3	32,970,000.00	
			d. Alat Pertanian	1	450,000.00	
			e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1695	7,628,358,060.00	
			f. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	144	1,031,860,600.00	

No Urut	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
			g. Alat Kedokteran Dan Kesehatan			
			h. Alat Laboratorium	188	936,929,448.00	
			i. Alat Persenjataan			
			j. Komputer	758	7,808,984,016.00	
			k. Alat Eksplorasi			
			l. Alat Pengeboran			
			m. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian			
			n. Alat Bantu Eksplorasi			
			o. Alat Keselamatan Kerja			
			p. Alat Peraga			
			q. Peralatan Proses/Produksi			
			r. Rambu - Rambu	1	21,240,000.00	
			s. Peralatan Olah Raga			
1	3	3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>25</b>	<b>11,130,502,500.00</b>	
			a. Bangunan Gedung	24	10,931,302,500.00	
			b. Monumen			
			c. Bangunan Menara			
			d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	199,200,000.00	
1	3	4	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>8</b>	<b>943,859,700.00</b>	
			a. Jalan Dan Jembatan			
			b. Bangunan Air	2	29,600,000.00	
			c. Instalasi	4	489,252,700.00	
			d. Jaringan	2	425,007,000.00	
1	3	5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>10</b>	<b>1,328,977,850.00</b>	
			a. Bahan Perpustakaan	10	1,328,977,850.00	
			b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
			c. Hewan			
			d. Biota Perairan			
			e. Tanaman			
			f. Barang Koleksi Non Budaya			
			g. Aset Tetap Dalam Renovasi			
1	3	6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>1</b>	<b>89,299,500.00</b>	
			a. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	89,299,500.00	
1	5	1	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>27</b>	<b>1,684,566,500.00</b>	
			a. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
			b. Aset Tidak Berwujud	13	1,626,322,000.00	
			c. Aset Lain-Lain	14	58,244,500.00	
			<b>JUMLAH</b>	<b>27</b>	<b>1,684,566,500.00</b>	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel Tahun 2022

**Tabel 1.3 Aset Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:**

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Note Book/ Laptop	186 unit	Kurang lebih 116 unit terpakai (selebihnya rusak)
2.	PC/ Komputer	190 unit	Kurang lebih 102 unit terpakai (selebihnya rusak)
3.	Printer	168 unit	Kurang lebih 78 unit yang terpakai (selebihnya rusak)
4.	Kendaraan Roda Empat	12 unit	Eselon 2 : 1 unit Eselon 3 : 6 unit Operasional : 4 unit Pinjam Pakai : 1 unit
5.	Kendaraan Roda dua	22 unit	Kasubag dan Sub kord : 18 unit Operasional 4 unit

**Tabel 1.4 Perbandingan Dukungan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Tahun	Jumlah
2021	Rp. 63.328.657.212,-
2022	Rp. 62.878.889.896,-

Sumber : Bappelitbangda 2022

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp. 62.878.889.896,-, yang dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 449,767,316,-.

## 1.8. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2022

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
Surat Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/3203/A.1/Itdaprov tanggal 29 Juli 2022		
a.	<p>SOP Pengumpulan data kinerja belum menggambarkan, prosedur pengembalian jika terjadi kesalahan untuk diperbaiki pada pelaksana kinerja</p> <p>Rekomendasi : Menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan prosedur pengembalian jika terjadi kesalahan untuk diperbaiki pada pelaksana kinerja</p>	SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan prosedur pengembalian jika terjadi kesalahan untuk diperbaiki pada pelaksana kinerja telah dilakukan revisi
b.	<p>Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)</p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) pada proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.</p>	Teknologi informasi (aplikasi) telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja dan akan menyusun system untuk pengumpulan data kinerja

Bab II berisi
2.1 Perencanaan Strategis
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2.3. Perubahan/ Perbedaan Perencanaan Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Tahun 2022, merupakan tahun pemulihan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dikarenakan dari pandemic Covid 19. Bappelitbangda sebagai

Organisasi Perangkat Daerah tetap berupaya untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

##### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka Panjang Sulawesi Selatan.

Bappelitbangda mendukung misi 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tujuan 1 (satu) dengan 2 (dua) sasaran, adapun sebagaimana tersebut dalam table berikut :

Tabel 2.1

**Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 Yang Diampuh oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

**Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif</b>			
1.	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Peningkatan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018- 2023. Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
<i>Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter</i>									
<i>Misi : Pemerintahan yang Berorientasi melayani, Inovatif dan Berkarakter</i>									
<i>Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan</i>									
<i>Sasaran RPJMD : Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan</i>									
<i>Indikator Sasaran RPJMD : Nilai SAKIP Provinsi</i>									
1.	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92%	94%	95%	96%	97%
				Nilai SAKIP OPD	80	80	80	81	83
				% Persentase Temuan Material	-	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Sulawesi	-	-	-	98.2%	98.3%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
				Selatan					
				Prosentase Indikator Program Pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%	92%	92%	92,5%	92,5%	93%
				Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional	100%	100%	100%	100%	100%
				Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RK PD	100%	100%	100%	-	-
				Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	96%	-	-
<b>Sasaran RPJMD : Berkembangnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public</b>									

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikator Sasaran RPJMD : Indeks Pelayanan Publik</b>									
3.			Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	-	-	20%	30%	40%

Sumber : Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

### 2. 1. 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bappelitbangda merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda Sulawesi Selatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun. Adapun strategi dan kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Perubahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dapat dijabarkan dalam **tabel 2.3** sebagai berikut:

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1) Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1) Peningkatan kualitas SDM (laki-laki dan perempuan) dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan 2) Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	1. Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (laki-laki dan perempuan) 2. Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda
(2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi	1. Peningkatan monitoring hasil evaluasi program-program pembangunan daerah melalui Simonev 2. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki agar bisa terintegrasi dengan sistem aplikasi dari luar.
		3. Peningkatan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern	3. Membangun link antar sistem informasi yang berada di luar Bappelitbangda dan didalam Bappelitbangda

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter			
MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan	4. Mengadakan pelatihan yang bekerjasama dengan Universitas atau Kementerian terkait
		5. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Provinsi dan Kab/ Kota	5. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki 6. Menyempurnakan forum-forum perencanaan dengan Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, Kementerian dan Stakeholder terkait 7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pusat dan Stakeholder terkait
		6. Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah antar Tingkatan Pemerintahan	8. Menyusun Standar atau panduan dalam Verifikasi Dokumen Perencanaan 9. Peningkatan verifikasi Renstra dan Renja OPD terhadap target Program/ Kegiatan RPJMD dan RKPD 10. Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

<b>VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter</b>			
<b>MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	3. Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	6) Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan	7. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan

Sumber : Renstra Perubahan Bapelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023

## 2. 2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam dokumen perjanjian kinerja ini juga memuat a) sasaran strategis, b) Indikator kinerja utama organisasi, dan c) target kinerja dan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/1360/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perubahan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULASI PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi</b>	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persen	$\frac{\text{Jmlh Program APBD thn berkenan}}{\text{Jmlh prog RPJMD}} \times 100\%$	Bidang terkait urusan perencanaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
<b>pembangunan daerah</b>	pembangunan daerah Sulawesi Selatan		yang harus dilaksanakan Tahun berkenan	
	Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil ( <i>Outcome</i> ) minimal 75%	Persen	<u>Jmlh Indikator program yang mencapai 75%</u> x 100% Jumlah Indikator Program	Bidang terkait urusan perencanaan
	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional	Persen	<u>Prioritas pembangunan Daerah</u> x 100% prioritas pembangunan nasional	Bidang terkait urusan perencanaan
<b>Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan</b>	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	Persen	<u>Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam inovasi daerah</u> x 100% jumlah hasil kelitbangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sumber : SK IKU Perubahan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

Perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan	98,25%
		Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah (Outcome minimal 75%)	92,5%
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan provinsi Sulawesi selatan terhadap prioritas nasional	100%
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	10%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (evaluasi Dokumen Perencanaan)	96%
		Nilai SAKIP OPD	81%
		% Temuan Material	0,06%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Bappelitbangda Prov. Sulse

Pada Tahun Anggaran 2022, Bappelitbangda Provinsi melaksanakan kegiatan dengan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 60.835.875.778,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 59.986.828.378,- dan Belanja Modal Rp. 849.047.400,- kemudian dengan melalui mekanis perubahan APBD Tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 62.878.889.896,- dengan rincian belanja operasi Rp. 61.769.832.896,- dan belanja modal Rp. 1.109.057.000,- .

Anggaran belanja Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dialokasikan ke sasaran Strategis adalah tercantum dalam **tabel 2.6** sebagai berikut :

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	Rp. 16.849.691.602,-	27%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
				Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangdan	Rp. 8.602.658.540,-	14%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 37.426.539.754,-	60%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 62.878.889.896,-</b>	<b>100%</b>	<b>Bappelitbangda</b>

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

### 2.3.Perubahan/ Perbedaan Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2022 Bappelitbangda mendapatkan coaching pohon kinerja dan renstra dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, dimana dalam coaching tersebut terdapat beberapa perubahan yaitu :

<b>Sasaran</b> <i>Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</i>	
<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RK PD	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
Tingkat konsistensi program RKPD kedalam APBD	

Keterangan menjadi : jumlah Program RPJMD tahun n yang diakomodir dalam APBD Tahun n.

Setelah itu pada tahun 2022, Bappelitbangda melakukan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan mendapat beberapa target yang diubah yaitu :

<b>Sasaran</b> <i>Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan</i>	
<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah <b>Jumlah Target : 30%</b>	% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah <b>Jumlah Target : 10%</b>

Bab III berisi  
3.1 Capaian Kinerja  
Tahun 2022  
3.2 Evaluasi dan  
Analisis Capaian  
Kinerja Sasaran  
Strategis  
3.3. Realisasi  
Anggaran

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu Organisasi.

Adapun Bappelitbangda Sulawesi Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bappelitbangda dengan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2022. Dengan perhitungan Capaian Kinerja didapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Target Rencana}}{\text{Target Rencana}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dijelaskan pada tabel 3-1.berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tahun 2022 merupakan Tahun keempat dalam Perencanaan Jangka Menengah, dan merupakan tahun perubahan dimana terjadi Perubahan RPJMD

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang diteruskan dengan Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018-2023. Adapun dikeranakan terjadi perubahan tersebut, maka terdapat beberapa indikator sasaran Bappelitbangda Tahun 2021 yang tidak terdapat pada indikator sasaran Tahun 2020, sehingga terdapa beberapa kinerja antara tahun 2020 dan 2021 yang tidak dapat dibandingkan.

Sebagai implemantasi dari **Keputusan Kepala Badan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/1360/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**, maka hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Capaian IKU Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2022**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan	%	98,25	99,6	101,32
		Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil ( <i>Outcome</i> ) minimal 75%	%	92,5	90,3	97,65
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional	%	100	100	100
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Prosentase hasil kelitbangdan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	%	10	10	100

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel 2022

Adapun sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan	%	98,25	99,6	101,32	SANGAT TINGGI
		Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%	%	92,5	90,3	97,65	SANGAT TINGGI
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional	%	100	100	100	SANGAT TINGGI
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangdan	Prosentase hasil kelitbangdan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	%	10	10	100	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	%	96	124,03	129	SANGAT TINGGI
		Nilai SAKIP OPD	%	81	81	100	SANGAT TINGGI
		% Temuan Material	%	0,06	0,06	100	SANGAT TINGGI

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel 2022

Bappelitbangda memiliki 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, persentase capaian sebesar 103,96% dengan 1 indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 :

#### 3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 1

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -1 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran ke – 1 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Sasaran ke 1, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Indikator	: 1. Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran 2. Persentase capaian kinerja pogram prioritas pembangunan daerah (outcome minimal 75%) 3. Persentase kesesuaian prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-1**

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2021)	2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Persentase	98,7%	98,25	99,6	(99,6/96,5)x100%	98,3	101,32

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2021)	2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
	konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan				= <b>101.32%</b>		
2.	Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah (Outcome minimal 75%)	90,6%	92.5	90,3	$(90.3/92.5 \times 100\% = \mathbf{97.65\%})$	93	<b>97.65%</b>
4	Persentase kesesuaian prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional	100%	100%	100%	$(100/100 \times 100\% = \mathbf{100\%})$	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					99.66%		

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

#### ❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

- ❖ Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, pengertian indikator ini adalah **Jumlah Program RPJMD yang harus direncanakan diadakan tahun 2022 dan diakomodir dalam APBD Tahun 2022 sebesar 100%.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat **223 (dua ratus dua puluh tiga) Program** dan berdasarkan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 8) terdapat **222 (dua ratus dua puluh dua) Program**. Hal tersebut juga dapat dilihat Laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Laporan Evaluasi Capaian RPJMD sampai dengan Tahun 2022, dan juga pada <https://e-planning.sulselprov.go.id/rkpd/contents/admin/#/beranda>. Adapun gambaran dari indikator pada sasaran ke-1 ini sebagaimana yang terdapat di eplanning, sebagai berikut :

Gambar 1

The image displays two screenshots of the e-planning system. The top screenshot shows a summary table with columns for 'RESTRUKTURISASI APBD' and 'APBUD DAERAH'. The bottom screenshot shows a detailed table with columns for 'Kode', 'Nama Perangkat Daerah', and various budget categories.

Sumber : <https://eplanning.sulselprov.go.id>

Adapun capaian kinerja sasaran ke-1, indikator ke-1 mengalami kenaikan sebesar 2,62% jika dibandingkan dengan kondisi capaian kinerja pada tahun 2021. Hal ini berarti indikator pada sasaran strategis sudah optimal

dalam memenuhi target pencapaian dan akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan capaian kinerja.

- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

### 1. Kegiatan Rapat-rapat yang menunjang sasaran

Gambar 2

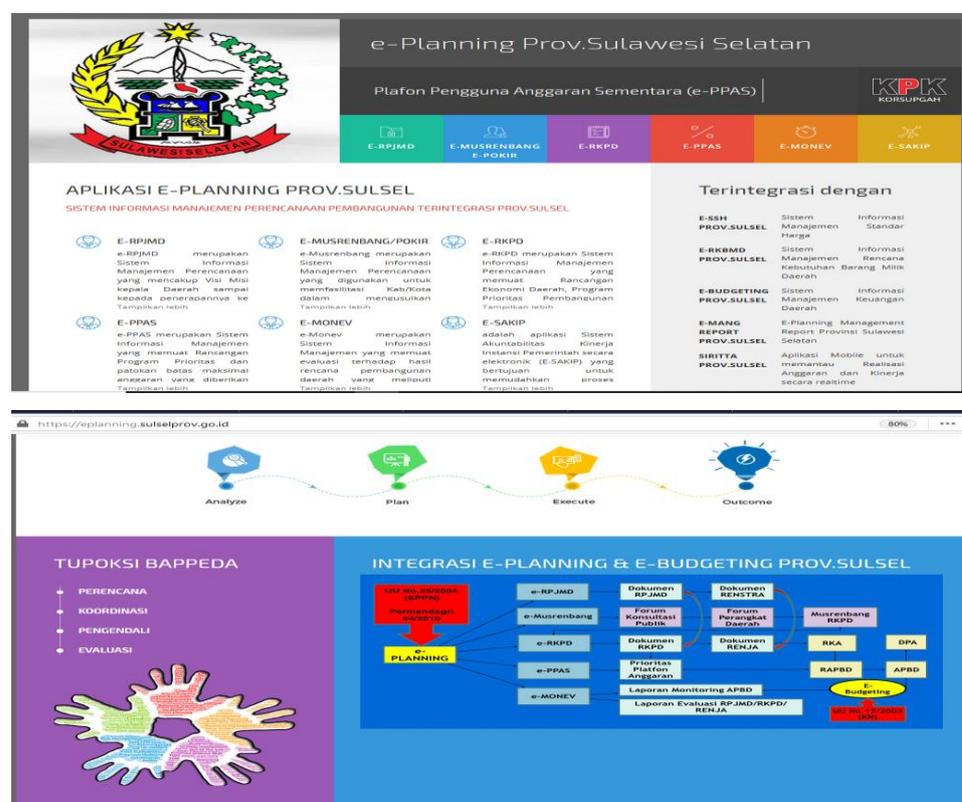


### 2. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (<https://eplanning.sulselprov.go.id/>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan di Sulawesi Selatan, Sistem ini telah terintegrasi dengan beberapa sistem

anggaran, asset, laporan dan evaluasi. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai dengan saat ini telah mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih baik, sejak penyusunan RPJMD sampai dengan KUA PPAS. Aplikasi ini pun selalu mengalami pengembangan dari tahun ke tahun, yang berdampak kepada kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

Gambar 3 Aplikasi e-planning



- ❖ Data hasil evaluasi kinerja sasaran ke-1, indikator 2, dengan indikator kinerja **Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah (outcome minimal 75%)** sampai dengan akhir Januari sebesar 90%. Jika dibandingkan kinerja yang ingin dicapai sebesar 92.5%, maka capaian ini rendah. Terdapat 140 (seratus empat puluh) Indikator Program Prioritas yang capaian hasilnya mencapai minimal 75% dari 155 (seratus lima puluh lima) program prioritas. Banyak factor yang menyebabkan indikator ini tidak tercapai, dan sebagian besar merupakan

factor eksternal. Salah satunya adalah perubahan kebijakan dan pemulihan pasca pandemic covid-19 menyebabkan dilakukan realokasi anggaran pada semua perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga alokasi anggaran yang rencana digunakan untuk mencapai indikator menjadi berkurang.

Adapun beberapa target dan realisasi dari indikator program prioritas tersebut, beberapa diantaranya adalah yang tersebut pada tabel yang tertera dalam lampiran 1.

- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

- 1. Kegiatan Rapat-rapat yang menunjang sasaran**

**Gambar 4**





## 2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang terdiri dari e-monev APBD, Penilaian Kinerja dengan alamat akses <https://eplanning.sulselprov.go.id/money> yang terintegrasi dengan E-Sakip. Sistem informasi monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerjanya. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

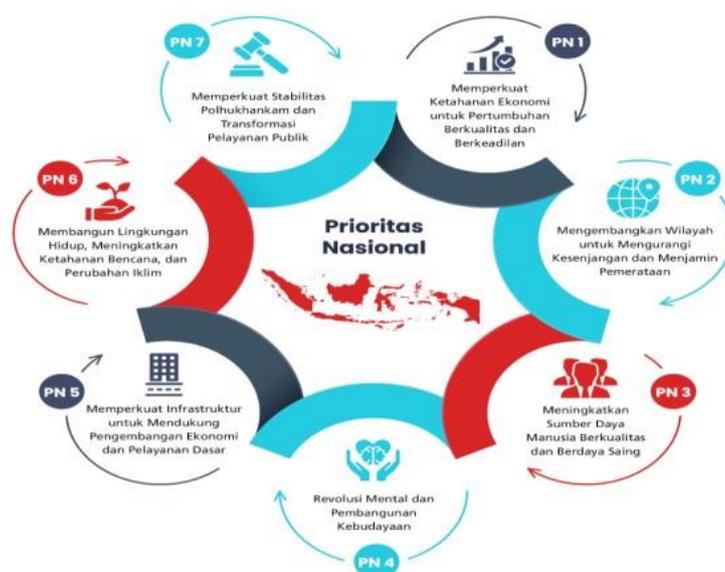
Gambar 5 Aplikasi Simonev

No	Nama OPD	Jumlah Program/Kelembagaan di APBD				Capaian Realisasi s.d Bulan ini				Sisa Ombudsman di Bulan ini
		P	K	S	3	Realisasi (Rp)	(%)	(%) Fisik	(%)	
1	Biro Kesehatan Rakyat	2	9	32	1,239,955,281,753,000	1,282,427,742,512,000	103.4%	103.1%	11,500,090,249,000	
2	Disdik Persekolahan dan Kelembagaan	4	15	41	69,169,042,438,000	69,376,648,498,000	100.1%	100.0%	709,163,940,000	
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	64	2,082,702,147,287,000	2,051,841,943,689,85	98.5%	99.96%	30,860,203,597,15	
4	Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	2	10	30	16,514,212,592,000	16,296,750,137,000	98.6%	99.78%	217,462,455,000	
5	Disdik Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	18	32	33,399,909,488,000	32,772,032,864,000	98.1%	100%	627,876,624,000	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4	15	47	43,599,037,000,000	42,518,117,047,000	97.5%	99.3%	1,080,920,013,000	
7	Disdik Perhubungan	4	18	44	83,379,368,218,000	81,090,261,448,000	97.2%	99.67%	2,289,106,769,000	
8	Biro Pemerintahan dan Administrasi Pembangunan	3	9	13	6,112,080,512,000	5,943,907,008,000	97.2%	100%	168,173,504,000	
9	Disdik Kependidikan dan Olahraga	4	16	53	67,178,911,538,000	65,261,193,317,000	97.1%	99.46%	1,907,718,221,000	
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	9	37	31,488,685,893,000	30,782,565,149,11	97.7%	100%	706,120,743,89	

- ❖ Tabel 3.4 menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **persentase kesesuaian prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap prioritas nasional sebesar 100%**.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 ditampilkan pada infografis dibawah ini. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut :

**Gambar 6 Prioritas Nasional Tahun 2023**



Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dan mendukung prioritas nasional tahun 2023 yang merupakan tahun awal dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

## Keselrasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1	Pemantapan perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Memperat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
2	Penguatan Infrastruktur Wilayah	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
3	Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PN 2
4	Penurunan Kesenjangan sosial ekonomi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PN 2
5	Akselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PN 1

No. PD	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
7	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6

Sumber : Peraturan Gubernur No.2 Tahun 2022 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan nasional yang akan ditempuh pada RKP 2023 dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian RPJMN 2020-2024, tujuh pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan di tahun 2023. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/ *Major Project* yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi target-target pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka hubungan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran prioritas nasional tahun 2023 sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

#### ❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023**

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-1 dan ke-3 maka dapat dilihat bahwasanya Tahun Keempat Renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%. Besar upaya Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja terhadap target Renstra 2023.

Adapun untuk capaian indikator ke-3 yaitu tidak mencapai target yang ingin diraih, yang disebabkan oleh faktor eksternal diantaranya adalah perubahan kebijakan dan dan efek pandemi *covid 19* sehingga target dari indikator tersebut tidak tercapai, dan tidak tercapainya beberapa target kinerja

program prioritas Perangkat Daerah yang mengakibatkan Bappelitbangda tidak mencapai target yang ditetapkan.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdapat di Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah.

**Tabel 3.6**

Sasaran	Program/ Kegiatan
<i>Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</i>	<b>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)</b>
	<i>a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>
	<i>b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
	<i>c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>
	<b>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>
	<i>a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>
	<i>b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>
<i>c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.8 sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Capaian Anggaran Sasaran ke-1**

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
<i>Meningkatnya keselarasan perencanaan</i>	Rp. 16.849.691.602	Rp. 14.721.585.790	87,4%

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
<i>dan evaluasi pembangunan daerah</i>			

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp14.721.585.790,- atau 87,4% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99.66%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 14%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.8

**Tabel 3.8 Tingkat efisiensi sasaran ke-I**

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	99,66%	87,4%	14%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

**Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:**

a. Pendukung :

- Komitmen pimpinan/ para pemangku kebijakan di daerah terhadap program.
- Terdapat konsistensi dalam implementasi program
- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait.
- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam perwujudan sinergitas pembangunan.

b. Permasalahan :

- Perubahan Peraturan di tingkat pusat sehingga memerlukan beberapa penyesuaian.
- Ketidacapaian target program pada beberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan sasaran Bappeda tidak mencapai target yang ditetapkan.

- Terjadi perubahan-perubahan Kebijakan Nasional sehingga menyebabkan indikator program di beberapa Perangkat Daerah tidak mencapai target.

**Solusi :**

- Menyediakan data pembangunan daerah yang valid dan mudah diakses
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah baik dari sasaran daerah, sasaran Perangkat Daerah, Program, kegiatan dan Sub kegiatan.
- Meningkatkan evaluasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah.

**3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 2**

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -1 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke – 2 ini menjadi sasaran yang berfokus di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sasaran ke 2, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan
Indikator	: % hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.9 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-5**

No	Indikator	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	% hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	20	10	10	$(10/10) \times 100\% = 100\%$	40%	50

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator % hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah sebesar **100%**.

Adapun judul penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan;
2. Kajian Upaya Penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Punagaan berbasis Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Kajian tentang Pengembangan Eko Wisata di Daerah Pesisir/ Kepulauan;
5. Rantai Nilai Agrowisata Berbasis Pedesaan di TWA Malino Sulawesi Selatan;
6. Studi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Bahuluang Berbasis Wisata Bahari di Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Reformulasi Kebijakan “New Normal Tourism” dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Pariwisata di Sulawesi Selatan;
8. Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Balanced Scorecard di Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Hilirisasi Pengelolaan Industri Kreatif di Sulawesi Selatan;
10. Penelitian Pengembangan Bibit *Porang Super Amorphophalus muelleri Blume* Sulawesi Selatan berbasis Teknologi;
11. Kajian Pengembangan dan Budidaya Jeruk Pangkep;
12. Kajian Pengembangan Kawasan Perkebunan Jeruk di Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. Analis PAD Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan (Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan);

14. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bantaeng;
15. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Bulukumba;
16. Kajian Penanggulangan dan Pengendalian Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Sinjai;
17. Hak Kekayaan Intelektual Produk Kopi Latimojong Luwu;
18. Prototype Alat/Mesin Roasting Kopi.

❖ ***Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023***

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-2, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun ketiga Renstra mengalami perubahan target yang awalnya 30% menjadi 10% dengan realisasi 11%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 40%, maka Bappelitbangda akan berupaya keras untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut.

- Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

**1. Kegiatan Rapat-rapat yang menunjang sasaran**

**Gambar 7**





❖ *Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya*

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran ketiga ini didukung oleh **Program Pengendalian dan Pengembangan Daerah**.

**Tabel 3.10**

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang	1. Program Pengendalian dan Pengembangan Daerah
	a. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>
	b. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>
	c. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>
	d. <i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.11 sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Capaian Anggaran Sasaran ke-2**

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang	Rp. 8.602.658.540	Rp. 7.141.187.252	83,01%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 7.141.187.252,- atau 83,01% dari target dan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 20% seperti yang digambarkan pada tabel 3.12

**Tabel 3.12 Tingkat efisiensi sasaran ke-2**

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang	100	83,01	20%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

**Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:**

a. Pendukung :

- Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan stakeholder terkait dalam meningkatkan inovasi Daerah guna mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Berkembangnya jaringan dan kerjasama kelembagaan litbang dengan adanya Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011.
- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal Bappelitbangda.

b. Permasalahan :

- Belum tersedianya data base kelitbang yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat

guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu actual dan strategis.

- Belum adanya database inovasi daerah lingkup OPD Prov. Sulsel,
- Belum terdapatnya wali inovasi di setiap OPD.
- Belum maksimalnya respon dari pimpinan perangkat daerah dalam inovasi perangkat daerah.

**Solusi :**

- Membuat data base terkait kelitbangan dengan menyesuaikan dari isu actual dan strategis yang terjadi dewasa ini.
- Membuat sistem data base inovasi daerah yang ada di setiap OPD lingkup Pemerintah Prov. Sulsel.
- Sosialisasi terhadap pimpinan perangkat daerah akan pentingnya komitmen dari pimpinan dalam pengembangan inovasi.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong pengembangan penelitian dan inovasi daerah.

**3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 3**

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke - 3 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran ke – 3 ini menjadi sasaran yang berfokus di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran ke 3, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	: 1. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) 2. Nilai SAKIP OPD 3. % Temuan Material

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

**Tabel 3.13 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3**

No	Indikator	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (evaluasi Dokumen Perencanaan)	146,22%	96	124,03	$(124,03/96) \times 100$ % = <b>129%</b>	97	129%
2.	Nilai Sakip OPD	82	81	81	$(81/81) \times 100\% = 100\%$	83	100%
3.	% Temuan Material	0,06	0,06	0,06	$(0,06/0,06) \times 100\% = 100\%$	0,05	100
Rata-rata Capaian Kinerja					109,27		

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

- Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)** sebesar **129%**.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebesar 129% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja pada masing-masing program yang terdapat di Bappelitbangda Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.14 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>						
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100%	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2.	Persentase peningkatan capaian kinerja program	%	0,5	0,5	100%	

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian	
<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
3.	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang PPM	%	80	80	100%	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4.	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan SDA	%	90	90	100%	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5.	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	90	90	100%	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>						
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	%	3	9,43	314,33	Bidang Penelitian dan Pengembangan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
7.	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	%	100	100	100	Sekretariat
8.	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	%	100	100	100	
9.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	101,9	101,9	

- Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Nilai Sakip OPD** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022, karena pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2022 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2022 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapat nilai 82 dengan capaian kinerja 100 %.

Disampaikan bahwa dalam hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda berdasarkan Hasil Evaluasi Sakip Bappelitbangda dengan nomor

Surat 700.04/3203/A.1/Itprov tanggal 29 Juli 2022 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 82 dengan **kategori A** (Memuaskan). Dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

- Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-3, dengan indikator kinerja **Persentase Temuan Material** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2022. Dikarenakan Inspektorat belum melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan Desember 2022.

Adapun sampai dengan 31 Juli 2022, tim Inspektorat telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 094/672/A.1/Itprov, tanggal 19 Agustus 2022, dinyatakan bahwa **tidak terdapat temuan material**, adapun temuan yang didapat bersifat administrative. Adapun Bappelitbangda telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, diantaranya :

1. Temuan hasil pemeriksaan tentang Dokumen Pertanggungjawaban Belanja belum lengkap, maka diinstruksikan kepada seluruh PPTK, PPK SKPD, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu agar cermat dalam melakukan verifikasi serta menyiapkan dokumen pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan dengan membuat daftar kelengkapan dokumen disetiap pengajuan pertanggungjawaban belanja;
2. Penugasan tenaga Non ASN dalam pengelolaan belanja kegiatan hanya sebagai supporting/ tenaga administrasi penatausahaan dan tidak terpusat kepada satu orang saja;

3. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran ATK wajib menggunakan Baju Bodo, dengan melaporkan secara berkala kepada Kepala Badan melalui PPTK masing-masing.
4. Dalam melakukan perjalanan dinas dengan tujuan yang sama dilarang dilakukan secara terpisah;
5. Perjalanan dinas dengan tujuan konsultasi dilarang melebihi 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) orang pelaksana SPPD;
6. Seluruh ASN diwajibkan membuat Keterangan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4), dan disampaikan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
7. Masing-masing alat pendingin ruangan (AC) dilengkapi dengan kartu pemeliharaan/ perawatan termasuk barang milik daerah lainnya yang membutuhkan perawatan secara berkala.

❖ ***Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023***

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Sasaran ke-3 Indikator 1 yaitu **Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah (evaluasi dokumen perencanaan)**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun keempat Renstra sebesar 124,03% dengan capaian 129%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 97%, maka besar upaya kinerja Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja ini.
- b. Pada Sasaran ke-3, Indikator 2 yaitu **Nilai Sakip OPD**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun keempat Renstra telah mendapatkan nilai SAKIP 82 atau **predikat A** dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83, maka Bappelitbangda akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan SAKIP, sehingga pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih atau bahkan melebihi dari target tahun terakhir Renstra Bappelitbangda.

c. Pada Sasaran ke-3, Indikator 3 yaitu **% Temuan Material**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun keempat Renstra sebesar 0,06 dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 0,05, maka diharapkan pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih.

➤ Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian indikator kinerja sasaran ini, diantaranya adalah :

### 1. Kegiatan Rapat-rapat yang menunjang sasaran

Gambar 8



❖ *Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya*

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran kedua ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Tabel 3.15

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
	b. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
	c. <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
	d. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
	e. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
	f. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
	g. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
h. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16 *Capaian Anggaran Sasaran ke-2*

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 37.426.539.754	Rp. 36.861.213.057	98,5%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.36.861.213.057,- atau 98,5% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 109,27%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 21,12% seperti yang digambarkan pada 3.17.

**Tabel 3.17 Tingkat efisiensi sasaran ke-3**

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	129		
	100		
	100		
Rata-rata Capaian Kinerja	<b>109,27</b>	98,5	11

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2022

**Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:**

a. Pendukung

- Koordinasi dan Kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

b. Permasalahan

- Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
- Terjadinya perubahan kebijakan dari pusat yang mempengaruhi perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- Terjadinya tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

**Solusi**

- Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan, baik dari kinerja maupun anggaran.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan rutin dalam hal pemeliharaan, pengadaan serta yang sifatnya pelayanan dilakukan pengukuran yang lebih terukur dengan pencapaian target kerja yang akan dicapai.
- Peningkatan kualitas SDM

- Terus meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran yang berorientasi hasil.
- Mengupdate informasi terkait kebijakan dan peraturan pemerintah pusat.
- Meningkatkan peran konsultasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai. Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar **Rp.61.769.832.896,-** dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.18 Target Belanja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan  
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022**

No.	Uraian	Target	Prosentase
1.	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 61.769.832.896,-</b>	<b>98%</b>
1.1	Belanja Pegawai	Rp. 28.954.033.106,-	47%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 32.815.799.790,-	53%
2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 1.109.057.000,-</b>	<b>2%</b>
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 944.057.000,-	85%
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 115.000.000,-	10%
2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 50.000.000,-	5%
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 62.851.929.896,-</b>	<b>100%</b>

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022

Adapun sumber pembiayaan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.19. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>62,878,889,896</b>	<b>58,724,302,399</b>	<b>4,154,587,497</b>	<b>93.39</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>37,426,539,754</b>	<b>36,861,213,057</b>	<b>565,326,697</b>	<b>98.49</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>693,963,900</b>	<b>637,201,006</b>	<b>56,762,894</b>	<b>91.82</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,701,000	58,884,844	1,816,156	97.01
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	111,260,300	108,351,174	2,909,126	97.39
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	522,002,600	469,964,988	52,037,612	90.03
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29,364,475,106</b>	<b>29,064,428,904</b>	<b>300,046,202</b>	<b>98.98</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,954,033,106	28,676,290,780	277,742,326	99.04
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	307,314,000	290,428,500	16,885,500	94.51
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	103,128,000	97,709,624	5,418,376	94.75
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>73,837,500</b>	<b>73,395,849</b>	<b>441,651</b>	<b>99.40</b>
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15,775,500	15,638,300	137,200	99.13
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58,062,000	57,757,549	304,451	99.48
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>403,733,100</b>	<b>400,953,334</b>	<b>2,779,766</b>	<b>99.31</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150,067,500	149,850,555	216,945	99.86
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	78,497,500	78,421,380	76,120	99.90
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,617,300	19,190,688	426,612	97.83
	4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155,550,800	153,490,711	2,060,089	98.68
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,164,298,900</b>	<b>2,157,754,467</b>	<b>6,544,433</b>	<b>99.70</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	148,332,500	148,080,660	251,840	99.83
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216,881,000	216,563,520	317,480	99.85

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5 (3-4)	6	
	3	Penyediaan Bahan/Material	39,255,500	39,094,000	161,500	99.59
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200,703,800	200,121,031	582,769	99.71
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,559,126,100	1,553,895,256	5,230,844	99.66
<b>6</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,085,227,000</b>	<b>973,476,046</b>	<b>111,750,954</b>	<b>89.70</b>
	1	Pengadaan Aset Tak Berwujud	54,040,000	3,878,025	50,161,975	7.18
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,031,187,000	969,598,021	61,588,979	94.03
<b>7</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>965,168,128</b>	<b>918,536,792</b>	<b>46,631,336</b>	<b>95.17</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163,936,500	157,838,523	6,097,977	96.28
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801,231,628	760,698,269	40,533,359	94.94
<b>8</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,675,836,120</b>	<b>2,635,466,659</b>	<b>40,369,461</b>	<b>98.49</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	644,590,000	619,684,285	24,905,715	96.14
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	574,858,560	563,141,195	11,717,365	97.96
	3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	103,964,500	102,449,000	1,515,500	98.54
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	549,836,560	548,952,940	883,620	99.84
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	802,586,500	801,239,239	1,347,261	99.83
<b>2</b>		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>11,261,969,814</b>	<b>9,990,286,797</b>	<b>1,271,683,017</b>	<b>88.71</b>
<b>1</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>3,451,093,500</b>	<b>3,172,683,610</b>	<b>278,409,890</b>	<b>91.93</b>
	1	Koordinasi Penalaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	393,251,200	337,448,135	55,803,065	85.81

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5 (3-4)	6	
	2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3,057,842,300	2,835,235,475	222,606,825	92.72
<b>2</b>		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>267,362,800</b>	<b>196,528,679</b>	<b>70,834,121</b>	<b>73.51</b>
	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	267,362,800	196,528,679	70,834,121	73.51
<b>3</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>7,543,513,514</b>	<b>6,621,074,508</b>	<b>922,439,006</b>	<b>87.77</b>
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	6,394,888,114	5,652,442,788	742,445,326	88.39
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	832,800,600	760,455,299	72,345,301	91.31
	3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	315,824,800	208,176,421	107,648,379	65.92
<b>3</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>5,587,721,788</b>	<b>4,731,615,293</b>	<b>856,106,495</b>	<b>84.68</b>
<b>1</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1,242,904,638</b>	<b>988,580,959</b>	<b>254,323,679</b>	<b>79.54</b>
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	128,052,800	98,556,630	29,496,170	76.97
	2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	177,720,100	131,369,388	46,350,712	73.92
	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	257,495,568	212,345,913	45,149,655	82.47
	4	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	282,445,000	235,054,992	47,390,008	83.22
	5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	224,351,170	175,090,772	49,260,398	78.04
	6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	172,840,000	136,163,264	36,676,736	78.78

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
2	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1,207,388,500</b>	<b>1,010,059,777</b>	<b>197,328,723</b>	<b>83.66</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	156,156,900	129,446,081	26,710,819	82.89
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	183,922,900	152,653,958	31,268,942	83.00
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian	265,222,400	234,627,820	30,594,580	88.46
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	151,785,100	123,451,448	28,333,652	81.33
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	171,943,300	147,053,437	24,889,863	85.52
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	278,357,900	222,827,033	55,530,867	80.05
3	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>3,137,428,650</b>	<b>2,732,974,557</b>	<b>404,454,093</b>	<b>87.11</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202,040,800	145,155,025	56,885,775	71.84
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	155,620,900	134,620,796	21,000,104	86.51
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2,174,150,250	1,948,870,236	225,280,014	89.64
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196,202,800	174,385,600	21,817,200	88.88
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	129,711,500	109,541,143	20,170,357	84.45
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	279,702,400	220,401,757	59,300,643	78.80

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>8,602,658,540</b>	<b>7,141,187,252</b>	<b>1,461,471,288</b>	<b>83.01</b>
<b>1</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>1,094,736,500</b>	<b>762,989,738</b>	<b>331,746,762</b>	<b>69.70</b>
	1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	833,107,200	517,086,486	316,020,714	62.07
	2 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	261,629,300	245,903,252	15,726,048	93.99
<b>2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>2,437,626,800</b>	<b>2,015,268,015</b>	<b>422,358,785</b>	<b>82.67</b>
	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	254,146,300	218,217,800	35,928,500	85.86
	2 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1,937,183,200	1,583,899,659	353,283,541	81.76
	3 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	246,297,300	213,150,556	33,146,744	86.54
<b>3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>3,714,460,940</b>	<b>3,156,429,553</b>	<b>558,031,387</b>	<b>84.98</b>
	1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	494,434,500	442,447,132	51,987,368	89.49
	2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1,076,851,400	955,782,836	121,068,564	88.76
	3 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	207,465,040	184,156,488	23,308,552	88.77
	4 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1,935,710,000	1,574,043,097	361,666,903	81.32
<b>4</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>1,355,834,300</b>	<b>1,206,499,946</b>	<b>149,334,354</b>	<b>88.99</b>
	1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	203,221,600	185,587,538	17,634,062	91.32
	2 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	32,580,000	30,450,900	2,129,100	93.47
	3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif	688,128,200	601,859,770	86,268,430	87.46

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
1	2	3	4	5 (3-4)	6
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	118,160,500	88,110,350	30,050,150	74.57
5	Fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	313,744,000	300,491,388	13,252,612	95.78

Sumber : Bappelitbangda Sulsel 2022

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dapat dilihat dalam lampiran 3.

Bab IV berisi  
1. Kesimpulan  
2. Rekomendasi

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menyampaikan kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappelitbangda sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 dengan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 8 (delapan) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 adalah sebesar 103,96%.
2. Realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar 93,39%.
3. Berdasarkan data kinerja dan data keuangan Bappelitbangda Tahun 2022, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 11%.
4. Secara umum, pencapaian target pada tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemic covid 19 dan perubahan kebijakan di tingkat pusat. Selain hal tersebut, ada beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi serta penelitian daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan
- Terdapat target sasaran Bappelitbangda pada tahun 2022 tidak berhasil dicapai karena faktor eksternal, yaitu dampak pandemic covid-19 masih dirasakan, sehingga berimbas kepada beberapa Perangkat Daerah yang tidak mencapai target kinerja programnya.

5. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai salah satu instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappelitbangda Sulawesi Selatan;
- Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan kelitbangan dari pemerintah pusat, Kabupaten/kota, seluruh OPD dan stakeholder terkait, serta membuat kebijakan perencanaan yang efektif.
- Melakukan diseminasi tentang data pembangunan daerah kepada semua Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi lainnya sesuai kewenangannya.
- Melakukan inovasi secara terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi, serta untuk mendukung ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih maju dan lebih baik.

**INTERPRETASI CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TA. 2022**

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp		
1	2	3	4	8		9				10	11	12	13		14	
<b>Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter</b>																
<b>Misi-1: Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif</b>																
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/Angka	BB (71 – 80)										A (81 – 90)		
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Provinsi	Huruf/Angka		68,274,381,879.0									A(>80 – 90)		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan SDM Aparatur yang Lulus Diklat Kompetensi Manajerial, Kompetensi Diklat Fungsional, Kompetensi Diklat Sosial Kultural	Persentasi	100	5,553,028,632.0	100	1,961,881,302.0	100.00	Sesuai	1. Kompetensi ASN Belum Memenuhi Standar (kebutuhan yang terus berkembang) 2. Kompetensi Talent Pool ASN belum memenuhi SMART ASN	1. Memperkuat Regulasi & ketentuan teknis Pemenuhan Hak & Kesempatan Pengembangan Kompetensi ASN 20 Jam Pelajaran & Pengembangan Kompetensi satu pintu, dengan arah kebijakan Membuat Peraturan Gubernur dan SOP tentang penentuan Prioritas Pengembangan Kompetensi; 2. Pengembangan Kompetensi dan uji kompetensi Manajerial, sosiokultural dan Pemerintahan (mandiri), dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi nonklasikal Substantif: Sektor Pariwisata, Usaha dan investasi, industri dan perdagangan, Pertanian, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup Umum: Pancasila, Budaya Agama, keuangan, perencanaan barjas, asset; 3. Pengembangan Kompetensi dan uji kompetensi Teknis, Manajerial, Sosiokultural& pemerintahan dengan manajemen Corpu (mandiri), dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi nonklasikal; 4. Pengembangan Kompetensi dan uji kompetensi Talent Pool dengan manajemen Corpu, dengan arah kebijakan Memperbanyak jenis Pengembangan Kompetensi non klasikal	1. Pemenuhan Hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi 20 jam/orang/tahun (manajerial, teknis, sosiokultural dan pemerintahan). 2. Kebijakan penyediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi diluar pembiayaan lainnya sebesar 0,34% dari anggaran belanja daerah. 3. Pemenuhan standart kompetensi bagi seluruh ASN. 4. Pengembangan kompetensi dan sertifikasi badi seluruh ASN melalui uji kompetensi.	100 %	17,318,167,264.0	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN	Persentasi	63	6,025,602,487.0	63	5,010,620,041.0	100.00	Sesuai					65 %	18,421,808,344.0	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	Persentasi	93		93		100.00	Sesuai					95 %		Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta	Persentase	90		90		100.00	Sesuai					100 %		Badan Kepegawaian Daerah
3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah	Persentasi	100	6,355,369,119.0	100	3,224,097,054.0	100.00	Sesuai				100 %	20,430,198,499.0	Biro Organisasi	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	% Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentasi	71.04	12,592,465,518.0	68.65	9,867,755,087.0	96.84	Belum Tercapai	dapat dijelaskan bahwa yang menjadi penghambat pada indikator kegiatan adalah beberapa LHP atas pemeriksaan reguler kabikota terbit di akhir tahun sehingga belum sempat untuk ditindak lanjut sampai dengan 31 desember			72.5 %	40,942,685,595.0	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	
		% Penyelesaian tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase	75.4		80.15		106.30	Melampaui	79.5 %	Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan					
		Persentase OPD yang hasil Nilai SAKIPnya meningkat	Persentase	100		100		100.00	Sesuai		Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan					
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD (Prioritas)	Persentasi	100	14,513,401,351.2	100	9,988,156,771.0	100.00	Sesuai				100 %	44,307,794,712.6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Persentase peningkatan capaian kinerja program (Prioritas)	Persentasi	0.5		0.5		100.00	Sesuai		0.5 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
6	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	indeks	3.1	4,000,000,000.0	0	7,103,670,224.0		Belum Tercapai	Nilai SPBE dari KemenPan RI belum dipublikasikan sampai sekarang			0 %	12,299,568,236.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
7	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Penataan Peraturan Perundang-undangan	Nilai	4	19,234,514,771.8	4	1,702,376,122.0	100.00	Sesuai	pelaksanaan pendampingan hukum dan penanganan kasus peradilan di luar kota makassar yang belum terakomodir secara keseluruhan dalam DPA sebagai penunjang operasional pelaksanaan untuk kegiatan yang dimaksud			5 Nilai	60,516,812,875.5	Biro Hukum	
		Persentase Perkara Hukum yang difasilitasi	Persentasi	100		100		100.00	Sesuai		100 %	Biro Hukum				
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUM Desa Yang difasilitasi	Persentasi	10.5	888,989,460.0	10.5		100.00	Sesuai				59.05 %	901,936,800.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Desa yang difasilitasi	Persentasi	5.01		5.01		100.00	Sesuai		25.05 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp		
1	2	3	4	8		9				10	11	12	13		14	
	Sasaran 2: Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	indeks	A- (4,01 – 4,50)	24,596,000,000.0								A (4,51 – 5,0)			
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)	Persentasi	3	6,405,000,000.0	9.43	7,141,187,252.0	314.33	Melampaui				9 %	24,666,924,704.0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
10	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	Persentasi	90	16,700,000,000.0	90	15,818,525,486.0	100.00	Sesuai				0 %	52,201,805,118.0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		Persentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	Persentasi	100		100		100.00	Sesuai				0 %		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	Persentase	82	1,491,000,000.0	82	681,878,862.0	100.00	Sesuai	1. Sarana dan prasarana pelayanan publik yaitu penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum memadai, sehingga penyempurnaan anggaran tahun anggaran berikutnya. 2. Anggaran koordinasi evaluasi kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan MPP di kab/kota tidak memadai 3. Anggaran untuk peninjauan lokasi permohonan berusaha yang tidak memadai 4. Penyelenggaraan gerai pelayanan di kab/kota tidak terlaksana akibat kurangnya sarana dan prasarana 5. Pelaksanaan survey IKM masih sementara dilaksanakan oleh surveyor eksternal	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Dukungan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan MPP, peningkatan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui MPP di kab/kota, dan peninjauan lokasi berusaha	84 %	4,315,672,696.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Misi-2: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel				0												
	Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Indeks Williamson	Indeks	0.600									0.600			
	Sasaran 3: Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	81.7	402,375,830,240.8								83.4			
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase	74.24	229,124,506,350.5	71.32	331,296,114,768.0	96.07	Belum Tercapai	Banyak pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan penyedia	Melanjutkan pekerjaan di Tahun 2023, Pagu anggaran untuk mencapai target RP-JMD	Rencana pelaksanaan pekerjaan sebaiknya dilaksanakan di awal tahun (bulan Februari dan Maret)	75.09 %	654,609,506,590.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Persentase panjang terisolir pada ruas jalan provinsi yang terakses roda empat)	Persentase	74.25		76.03		102.40	Melampaui						80 %	
13	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan (Prioritas)	Orang	1074000	37,895,020,000.0	2,024,388	2,274,271,175.0	188.49	Melampaui	Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Pada Pelabuhan Penyeberangan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan	Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pelabuhan Laut serta Pelabuhan Penyeberangan	Peningkatan Kapasitas ,Sarana Pelabuhan Penyeberangan	0 %	110,840,772,580.0	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelabuhan yang beroperasi	Persentase	10.00		9		90.00	Belum Tercapai	Belum adanya P3D Pelabuhan Pengumpan dari Kementerian Perhubungan ke Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah 9 (sembilan ) Pelabuhan Pengumpan	Telah dilakukan Koordinasi dan Proses Penyerahan P3D Pelabuhan Pengumpan melalui Proses Pra P3D dengan Persiapan BAST ( Berita Acara Serah Terima ) Pelabuhan Pengumpan beserta Aset,Anggaran dan Personilnya.	Melakukan Koordinasi Percepatan Penandatanganan BAST	0 %		Dinas Perhubungan	
14	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase	98.5	15,466,113,573.0	270.4	1,902,469,152.0	274.52	Melampaui			perlu nya perencanaan teknis yang lebih matang dan mempercepat proses pelaksanaan dalam pencapaian target,melakukan pemetaan lokasi yang menjadi prioritas	99 %	47,218,853,801.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Persentase Desa berlistrik (Prioritas Desa Kepulauan)	Persentase	99.25		100		100.76	Melampaui					99.5 %		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
15	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA (SPM/Prioritas)	Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kondisi baik pada Di Kewenangan Provinsi (Prioritas)	Persentase	61.72	91,951,385,636.3	77.72	32,920,426,772.0	125.92	Melampaui				63.37 %	311,204,721,172.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Cakupan pengelolaan sungai, danau, waduk, dan pantai	Persentase	100		100.00		100.00	Sesuai					100 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Rumah tangga bersantasi di kawasan permukiman	Persentase	92	2,924,590,828.0	97.36	13,925,664,576.8	105.83	Melampaui				93 %	16,212,208,960.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Persentase rumah tangga yang berakses air bersih layak/Arasinum di kawasan pesisir dan Kepulauan	Persentase	100		100		100.00	Sesuai					100 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase panjang jalan lingkungan yang terbangun di kawasan permukiman	Persentase	80		100		125.00	Melampaui					100 %		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase warga negara memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)	Persentase	86.28	25,014,213,853.0	91.18	182,002,362.0	105.68	Melampaui				89.62 %	51,108,112,187.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
		Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum Kab/Kota (SPM)	Persentase	100		100.00		100.00	Sesuai					100 %		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Misi-3: Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif				0												
	Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	PDRB Perkapita	Juta Rp.	62,37									65,98			
		Angka Kemiskinan	%	8.10									7.45			
	Sasaran 4: Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7.0	148,427,253,267.0								6.27			

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp		
1	2	3	4	8		9				10	11	12	13		14	
18	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan	Persentase	0.7		0.6	10,231,219,125.0	3,114,597,100.0	85.71	Belum Tercapai	Masih terdapatnya beberapa destinasi pariwisata yang membutuhkan bantuan pengembangan namun belum memiliki dokumen perencanaan yang lengkap, seperti RPPAR KAB./KOTA dll. Selain itu beberapa destinasi, khususnya destinasi wisata alam masih belum jelas dasar kepemilikannya, mengingat Pembangunan/Pengembangan Destinasi Wisata di Kab./Kota yang bukan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Hibah.	Perlu dilakukan monitoring terhadap destinasi-destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan agar dapat diberikan bantuan pengembangan/difasilitasi destinasi wisata di kab./kota.	1%	28,586,492,063.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	
		Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata halal	Persentase	12.5		12.5			100.00	Sesuai	Koordinasi dengan pihak kab./kota serta para pelaku industri pariwisata, khususnya yang bergelut di urusan wisata halal/ramah muslim	perlu ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi di kab./kota terkait dengan penerapan/implementasi konsep wisata halal/ramah muslim	20.8%		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	
19	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara) (Prioritas)	Peningkatan Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	100		100	18,467,816,177.0	4,072,413,610.0	100.00	Sesuai	Adanya pelanggaran penerbangan dalam negeri, sehingga membuka peluang untuk wisatawan domestik berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, khususnya di Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menyebabkan capaian kunjungan wisatawan nusantara dapat terrealisasi sebanyak 7.590.063 Kunjungan atau 367,10% dari target sebanyak 2.067.550 Kunjungan	Perlu didukung dengan promosi pariwisata, baik melalui promosi digital (pemanfaatan media sosial) ataupun melalui partisipasi pada direct promotion (promosi dalam negeri)	100%	66,210,377,548.0	Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	
		Persentase Capaian Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara) (Prioritas)	Persentase	100		100			100.00	Sesuai	Terbatasnya orang untuk melakukan perjalanan juga menjadi salah satu persoalan sulitnya tercapai kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan, terutama wisman, karena beberapa negara masih membatasi keluar masuk warganya sehingga menjadikan target kunjungan wisatawan mancanegara hanya dapat dicapai sebanyak 70.997 kunjungan atau 75,73% dari target sebanyak 93,750	Perlu koordinasi dengan pihak pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) terkait dengan penerapan konsep CHSE (Clean, Healthy, Safety, Environment) yang telah dilakukan di beberapa provinsi, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat menarik minat wisatawan mancanegara berkunjung	100%		Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata	
20	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru yang dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya	Kawasan	13		14	109,353,237,501.0	23,287,152,046.0	107.69	Melampaui			15 Kawasan	308,598,763,724.0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
21	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Persentase	4.13		9.49	579,073,750.0	439,638,151.0	229.78	Melampaui	Kurangnya data yang akurat dari Kab/Kota	(1) Mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada dalam pelaksanaan kegiatan (2) Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan pencari, lowongan dan penempatan tenaga kerja	4.35%	3,562,477,560.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase daya serap tenaga kerja (Prioritas)	Persentase	59.09		63.19			106.94	Melampaui	Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan tenaga kerja sehingga dapat bersaing dalam pasar kerja	Menambah kegiatan pelatihan yang berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	59.41%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
22	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan	Persentase	75		83.33	3,445,906,714.0	1,854,460,035.0	111.11	Melampaui	(1) Pelatihan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta (2) Mengoptimalkan sumberdaya dalam pelaksanaan pelatihan	Perlu alokasi anggaran untuk memonitoring dan mengevaluasi peserta pasca pelatihan	77.08%	11,958,882,514.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri	Persentase	80		100			125.00	Melampaui	(1) Perekrutan/seleksi calon peserta pelatihan sesuai standar pelatihan (2) Pelatihan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta (2) Mengoptimalkan sumberdaya dalam pelaksanaan pelatihan	Menambah jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan, sehingga pendaftar yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan, dapat diikutkan pada kegiatan berikutnya	85%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA	Rp. triliun	4		4.57	1,640,000,000.0	1,148,746,767.0	114.25	Melampaui			19.94 Rp. Triliun	4,887,034,000.0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Jumlah Realisasi PMDN	Rp. triliun	5		5.47			109.40	Melampaui			29.98 Rp. Triliun		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
24	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persentase	25.74		0.22	4,710,000,000.0	4,635,089,298.0	0.85	Belum Tercapai			29.45%	15,197,136,700.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	11.31		11.31			100.00	Sesuai			12.06%		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
Sasaran 5: Menurunnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat		Rasio Gini	Nilai	0.4		206,871,110,990.0						0.381				
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh tertangani kewenangan provinsi (Prioritas)	Persentase	23.42		25.39	10,763,514,632.0	4,368,635,984.9	108.41	Melampaui			36.37%	29,940,543,696.0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO UMKM	Cakupan UMKM yang diberdayakan	Persentase	10		11	5,970,713,750.0	1,704,021,262.0	110.00	Melampaui	dalam menghasilkan produk belum konsisten dari pengolahan produk lebih banyak varian yang dihasilkan dan sesuai segmen pasar yang akan dituju	Melakukan optimalisasi diferensiasi produk untuk pengolahan produk lebih banyak varian yang dihasilkan dan sesuai segmen pasar yang akan dituju	diperlukan diklat dan bimtek yang sesuai kebutuhan dari UMKM	10%	17,730,423,875.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang terfasilitasi Dalam Pengembangan Usaha	Persentase	10		10	2,921,989,563.0	2,138,918,719.0	100.00	Sesuai	hambatan dan kendala disebabkan karena legalitas kelembagaan dan produk belum dimiliki oleh UMKM	Menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait dengan penerbitan legalitas kelembagaan dan sertifikasi produk	diperlukan sosialisasi dan pembekalan bagi UMKM	10%	8,677,038,572.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)		3		3			100.00	Sesuai	hambatan dan kendala nya adalah disebabkan produk UMKM belum memiliki kemasan sesuai ketentuan	Adanya rumah kemasan yang dapat membantu UMKM	Mendorong agar setiap Kabupaten Kota ada rumah kemasan sehingga memudahkan UMKM	14%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp	
1	2	3	4	8		9				10	11	12	13		14
28	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Jumlah Pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	Persentase	16.25	8,400,101,500.0	17.46	37,729,557,126.0	107.45	Melampaui				16.55 %	42,452,173,500.0	Dinas Kehutanan
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang dilatih untuk dapat lebih mandiri	Persentase	100	67,315,000.0	100	65,965,000.0	100.00	Sesuai	Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan warga transmigrasi	Bantuan dan pembangunan peningkatan sektor ekonomi lokasi transmigrasi	100 %	535,892,500.0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase ketersediaan data sarana dan prasarana	Persentase	100		100		100.00	Sesuai	Mengoptimalkan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota yang menangani ketransmigrasian	Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan sarana prasarana yang ada di lokasi transmigrasi	100 %	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial	Persentase	4	10,021,112,326.0	3.6	4,499,052,018.0	100.00	Sesuai			3.7 Jiwa	31,063,528,909.0	Dinas Sosial	
		Persentase pengangkatan anak WNI oleh orang tua tunggal	Persentase	100		100		100.00	Sesuai			100 %	-	Dinas Sosial	
31	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Daging	Ton	177,425,745	168,050,375,319.0	174,719,828	325,061,344,205.9	98.47	Belum Tercapai			187450880 Kg	74,155,856,677.0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Produksi Telur	Ton	2,035,655		299,328,016		12,739.29	Melampaui		222171678 Kg	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		Produksi Susu	Ton	208,396,011.00		2,461,024		1.10	Belum Tercapai		2159626 Kg	-	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
		Jumlah produksi Talas Satoimo	Ton	7,000.00		0			Belum Tercapai	Tidak ada permintaan/proposal dari kelompok tani terkait permintaan kegiatan pengembangan talas satoimo	socialisasi kegiatan ditingkat petani terkait prospek pengembangan talas satoimo	- Pengkajian anggaran perlu dilakukan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan, serta melakukan anisiasi untuk investasi penanaman modal dalam pengolahan talas satoimo di Sul-Sel	26432.55 Ton	33,426,253,121,241.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Produktivitas Padi	Kw/Ha	49.68		51.25		103.16	Melampaui		50.43 Kw/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
		Luas Areal Pengembangan Jeruk Keprok Selayar (Ha)	Ha	110.00		130		118.18	Melampaui		331 Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
		Produktivitas Kakao	Kg/Ha	634		715		112.78	Melampaui		634 Kg/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
		Produktivitas Jagung	Kw/Ha	54.91		55.04		100.24	Melampaui		55.73 Kw/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
		Cakupan Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian	Unit	275		14,111		5,131.27	Melampaui		1655 Unit	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
		Produktivitas Kopi	Kg/Ha	588		652		110.88	Melampaui		588 Kg/Ha	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Peningkatan Ketersediaan Pupuk	Ton	311	22,658	7,294.91	Melampaui		1495.55 Ton	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)	Persentase	1.54	3,507,921,602.0	1.54	-	100.00	Sesuai			1.57 %	3,179,352,637.0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase PKK aktif	Persentase	98.69		98.69		100.00	Sesuai			98.94 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Posyandu aktif	Persentase	99.91		99.91		100.00	Sesuai			99.98 %	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan	Persentase	10	675,988,500.0	10	413,387,645.0	100.00	Sesuai	- banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan belum tertib pada peraturan yang berlaku saat ini, sehingga terjadi kemacetan usaha koperasi terutama disektor ril koperasi - Kurangnya pemberdayaan pada koperasi sektor ril dalam kaitannya penyaluran kegiatan usaha di daerah - Perlindungan pada aset koperasi sehingga terhindar dari alih fungsi aset koperasi ataupun di pindahtangan kepada pihak lain	- Adanya kolaborasi atau sinergitas dalam pemberdayaan koperasi sektor ril terutama dalam penyaluran pupuk, pendistribusian beras dll,  - sistem Kemitraan dengan usaha besar, BUMN atau pemerintah daerah dalam memberdayakan koperasi sektor ril - Perluanya regulasi yang mengatur aset koperasi	10 %	2,034,110,850.0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter				0											
Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas SDM secara inklusif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72.57									73.05		
Sasaran 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan		Indeks Pendidikan	Nilai	66.6	999,785,169,147.0								67.05		
34	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SPM Prioritas)	Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)	Persentase	100	996,300,000,000.0	100	834,338,671,714.0	100.00	Sesuai	Hambatan dan kendala persentase jumlah warga negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, kurang optimalnya penggunaan anggaran	1. Usulan anggaran tidak ada perubahan. 2. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD dan APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.	Dengan ketersediaan anggaran akan meningkatkan hasil capaian, untuk itu diperlukan peningkatan anggaran	100 %	3,027,185,287,047.0	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran	Persentase	61.15		9		14.72	Belum Tercapai			62 %	-	Dinas Pendidikan	
		Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)	Persentase	92.9		24		25.83	Belum Tercapai			93.9 %	-	Dinas Pendidikan	
		Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM)	Persentase	100		30		30.00	Belum Tercapai	Hambatan dan kendala persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus, dikarenakan kurang optimalnya penggunaan anggaran	1. Usulan anggaran tidak ada perubahan. 2. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD dan APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.	Dengan ketersediaan anggaran akan meningkatkan hasil capaian, untuk itu diperlukan peningkatan anggaran	100 %	-	Dinas Pendidikan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp					
1	2	3	4	8		9				10	11	12	13		14				
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KURKULUM (Prioritas)	Persentase Sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama (Prioritas)	Persentase	55.6	3,485,169,147.0	25	361,164,788.0	98.21	Belum Tercapai	Hambatan dan kendala dalam menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama, masi kurangnya anggaran dan masih kurangnya kerjasama yang berkaitan dalam muatan lokal	Meningkatkan anggaran dan kerjasama dalam kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama	Dengan ketersediaan anggaran akan meningkatkan hasil capaian, untuk itu diperlukan peningkatan anggaran	57.25 %	8,234,911,794.0	Dinas Pendidikan				
		Persentase Pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan berbasis TK	Persentase	81		0		Belum Tercapai						0 %	-	Dinas Pendidikan			
	Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai	77.8	168,936,242,099.4							77.86							
36	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	Persentase	100	13,950,000,000.0	100	44,055,208,635.0	100.00	Sesuai				300	65,864,362,050.0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
		Persentase Peningkatan Prestasi olahraga	Persentase	100		100		100.00	Sesuai				200 %	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
37	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk	100.000 Penduduk	23	9,986,637,460.0	27	6,325,056,570.0	117.39	Melampaui	Sosialisasi dan advokasi dilakukan melalui online dan WA serta melakukan pengusulan perencanaan perekrutan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan keuangan anggaran daerah	Sosialisasi dan advokasi dilakukan melalui online dan WA serta melakukan pengusulan perencanaan perekrutan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan keuangan anggaran daerah	melakukan sosialisasi dan advokasi secara langsung dengan lintas sektor dan kabupaten	23 %	11,423,000,000.0	Dinas Kesehatan				
		Persentase Keterpenuhan SDM Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan	Persentase	97							Belum Tercapai	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan SDM Kesehatan, Kuota Pengangkatan Tenaga Kesehatan yang masih terbatas	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM, mengirim tenaga teknis untuk mengikuti bimtek & pelatihan	Mengoptimalkan pelaksanaan peningkatan SDM	0 %	-	UPT Transfusi Darah		
		Persentase tenaga medis yang tersertifikasi	Persentase	1		1		100.00	Sesuai						3 %	401,516,780.0	UPT Pelatihan Kesehatan		
		Cakupan Pelatihan dan modul yang terakreditasi	Persentase	1		1		100.00	Sesuai						5 %	-	UPT Pelatihan Kesehatan		
		Persentase tenaga kesehatan gigi dan mulut yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan	Persentase	100								Belum Tercapai	Program, Kegiatan tidak terakomodir ditahun 2022	Program, Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2023	Diharapkan pada Tahun 2023 Program, Kegiatan dapat dilaksanakan	300 %	1,000,000,000.0	UPT RSK Gigi dan Mulut	
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	100								100.00	Sesuai			100 %	2,162,691,425.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji	
		Persentase Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	90								100.00	Sesuai			100 %	9,450,000,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar	
		Persentase Kapasitas SDM Kesehatan yang ditingkatkan	Persentase	100									Belum Tercapai			100 %	-	Rumah Sakit Khusus Daerah	
		Persentase tenaga kesehatan RSK yang telah memperoleh pendidikan kompetensi teknis	Persentase	100									Belum Tercapai			100 %	689,700,000.0	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Peritiwi	
		Persentase kompetensi Sumber daya Manusia kesehatan	Persentase	77.4									Belum Tercapai	Program, Kegiatan tidak terakomodir ditahun 2022	Program, Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2023	Diharapkan pada Tahun 2023 Program, Kegiatan dapat dilaksanakan	100 %	956,594,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah
		Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	Persentase	12								833.33	Melampaui			24 %	2,162,691,425.0	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat	
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM/Prioritas)	Persentase RS Regional yang terbangun dan ditingkatkan	Unit	50.0	144,999,604,639.4	0	128,515,548,576.0		Belum Tercapai	Perumusan dalam Pengukuran Indikator Kinerja belum jelas pertimbangan perbedaan pembobotan persentase realisasi kinerja terhadap besaran alokasi anggaran	Koordinasi pihak terkait dalam hal penentuan rumusan indikator kinerja	Dalam penentuan target berikutnya harus diperjelas definisi operasional sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam pengukuran kinerja. Selanjutnya pembuatan time schedule dan Network planning untuk mengejar pencapaian target mengingat waktu terbatas	100 %	230,748,380,762.0	Dinas Kesehatan				
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100.0		100		100.00	Sesuai		Peningkatan kapasitas petugas dan penguatan koordinasi jejaring.	Penguatan koordinasi jejaring dalam penanggulangan KLB dan pelaksanaan kajian KLB	100 %	-	Dinas Kesehatan				
		% RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase	90		100		111.11	Melampaui			Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan	100 %	-	Dinas Kesehatan				
		Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	12.5		9.66		77.28	Belum Tercapai	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Asupan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tidak tersedia datanya dalam pelaporan program gizi masyarakat sehingga data yang digunakan adalah data ibu hamil keK yang mendapat makanan tambahan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil	Tahun 2023, telah diatokasikan penganggaran melalui dana BOK PKM untuk program PMT Lokal guna memenuhi asupan gizi pada ibu hamil 1000 HPK dengan kriteria seluruh ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)			13 %	-	Dinas Kesehatan			
		Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persentase	100		100		100.00	Sesuai			Sosialisasi dan advokasi terkait pelayanan krisis kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola program kabupaten kota, monitoring dan evaluasi kegiatan di kabupaten kota serta penguatan jejaring terkait krisis kesehatan	Dukungan kebijakan dan Pembiayaan terkait program krisis kesehatan serta Penyediaan sarana dan prasarana	100 %	-	Dinas Kesehatan			
		Persentase anak yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persentase	7		5.79		82.71	Belum Tercapai	Persentase Anak Yang Mendapat Asupan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tidak tersedia datanya dalam pelaporan program gizi masyarakat sehingga data yang digunakan adalah data anak gizi kurang yang mendapat makanan tambahan dibandingkan jumlah sasaran baduta	Tahun 2023, telah diatokasikan penganggaran melalui dana BOK PKM untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal guna memenuhi asupan gizi pada anak 1000 HPK dengan kriteria sasaran anak dengan weight faltering, berat badan kurang dan gizi kurang			7.5 %	-	Dinas Kesehatan			

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp	
1	2	3	4	8		9				10			13		14
		Rasio Kebutuhan Transfusi Darah Terhadap Ketersediaan Stok Darah	Persentase	85		55		64.71	Belum Tercapai	Masyarakat belum terlibat secara maksimal pada kegiatan donor darah. Terdapat produk hasil darah yang tidak layak berdasarkan hasil screening	Mengupayakan peningkatan jumlah pendonor darah melalui kegiatan promosi dan edukasi kepada masyarakat secara luas	Membangun jejaring kemitraan dengan semua stakeholder untuk peningkatan partisipasi donor darah	0 %	40,629,635,230.0	UPT Transfusi Darah
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase	1		1		100.00	Sesuai				3 %	1,244,896,171.0	UPT Pelatihan Kesehatan
		Persentase pasien yang mendapatkan layanan sesuai dengan standar	Persentase	100		1		1.00	Belum Tercapai	Program, Kegiatan tidak terakomodir ditahun 2022	Program, Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2023	Diharapkan pada Tahun 2023 Program, Kegiatan dapat dilaksanakan	300 %	1,244,896,171.0	UPT RSK Gigi dan Mulut
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	90		90		100.00	Sesuai				100 %	86,020,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	90		90		100.00	Sesuai				100 %	86,020,500,000.0	Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	100		90		90.00	Belum Tercapai				100 %	116,989,806,650.5	Rumah Sakt Khusus Daerah
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase	100		100		100.00	Sesuai				100 %	19,369,442,281.7	Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertwi
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Persentase	95		90		94.74	Belum Tercapai	Program ini tidak mendapatkan alokasi anggaran APBD dan juga tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.	Program, Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2023	Diharapkan program kegiatan ini mendapat dukungan anggaran sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2023	100 %	86,020,500,000.0	Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah
		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Sayang Rakyat dalam kondisi baik	Persentase	75		100		133.33	Melampaui				85 %	17,780,396,589.7	Rumah Sakit Umum Sayang Rakyat
	Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76.4	1,340,501,000.0								77.23		
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	% Kab/Kota yang memenuhi indikator prasyarat PUG	Persentase	71	910,501,000.0	71	807,051,244.0	100.00	Sesuai				75 %	3,106,756,100.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		% Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi	Persentase	25		25		100.00	Sesuai				35 %		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% Kab/Kota yang menyediakan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase	37.5	430,000,000.0	37.5	678,012,636.0	100.00	Sesuai				50 %	1,274,010,300.0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sasaran 9: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Kasus	24.6	1,227,774,856,010.9								24.438		
41	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	Persentase	100		100	2,122,076,068.0	100.00	Sesuai				100 %		Satuan Polisi Pamong Praja
42	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Persentase/Dokumen	9		8		88.89	Belum Tercapai			9 Dokumen	3,679,979,284,050.0	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara AlQuran (Prioritas)	Persentase	35.5	1,226,220,302,319.0	45.14	43,613,286,294.0	127.15	Melampaui				35.75 %		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah kasus kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	Persentase	10		4.43		44.30	Belum Tercapai				10 %		Biro Kesejahteraan Rakyat
43	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam bela negara	Persentase	20	285,144,005.7	20	2,863,844,605.0	100.00	Sesuai				60 %	874,625,959.5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Penyalahgunaan Narkoba (Prioritas)	Persentase	20	1,269,409,686.3	20	705,823,590.0	100.00	Sesuai				0 %	3,893,677,029.2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Wilayah Sulsel Berpotensi Konflik Agama yang ditangani	Persentase	100		100		100.00	Sesuai				100 %		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Misi-5: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan			0											
	Tujuan 5: Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,62 – 5,98									5,04 – 6,52		
	Sasaran 10: Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah	Produktifitas Total Daerah	Rp / Angkatan Kerja	77,086,000.1	374,928,301,643.6								77,349,122		
45	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Serangan OPT	Persentase	5		2		40.00	Belum Tercapai	Semakin kecil persentase yang dihasilkan maka semakin rendah luas serangan OPT			5 %	49,956,207,069.0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Persentase Penggunaan Benih Padi Bersertifikat	Persentase	81.15	19,558,609,875.0	65	5,286,550,170.0	80.10	Belum Tercapai	- Masih rendahnya pengeluaran petani terhadap pentingnya penggunaan benih bersertifikat	- Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani penangkar - Melakukan sosialisasi terhadap kelompok tani tentang penting penggunaan benih bersertifikat	- Pengalokasian anggaran - Pembinaan kelompok penangkar	81.15 %		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional	Persentase	68.42	25,376,403,075.0	68.42	16,018,427,221.0	100.00	Sesuai				78.95 %	80,980,057,803.8	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp. Miliar	9029.52		11740		130.02	Melampaui				9210.12 Rp. M		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap	Ton	404932.2		425,571.68		105.10	Melampaui				413030.8 Ton		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase	27.07		27.39		101.18	Melampaui				30.25 %		Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp	
1	2	3	4	8		9				10	11	12	13		14
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan	Persentase	26,79		29,43		109,85	Melampaui				27,17 %		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan budidaya	Rp. Miliar	15198,47		22080		145,28	Melampaui				15958,39 Rp. M	47.230.035.000,0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan budidaya	Ton	4093705,8		4.092.413,40		99,97	Belum Tercapai				4298391,1 Ton		Dinas Kelautan dan Perikanan
47	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase ketersediaan benur berkualitas	Persentase	100	15.805.500.000,0	95,55	7.973.125.034,0	95,55	Belum Tercapai	1. Sarana produksi (Panti Bedih/kolam benih) sedang direhabilitasi. 2. Sering terjadinya gagal panen akibat serangan penyakit. 3. Fluktuasi suhu yang tidak stabil akibat curah hujan yang tinggi menyebabkan kegagalan panen.	1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi yang ada. 2. meningkatkan kualitas benur dan membuat jaminan bebas virus melalui hasil uji PCR. 6. melakukan monitoring dan evaluasi kualitas secara prodiik agar perubahan suhu dapat lebih cepat tertangani dan dikendalikan	1. Perlu nya sarana dan prasarana penunjang produksi yang lebih memadai berupa sarana laboratorium, sarana panti/kolam perbenihan. 2. perlu nya perbaikan kualitas air di lokasi perbenihan.	100 %		Dinas Kelautan dan Perikanan
48	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi (prioritas)	Persentase	61,6		0,67		1,09	Belum Tercapai				61,66 %	22.897.424.050,0	Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	M3	92336,62	9.101.570.350,0	26	14.510.677.135,4	0,03	Belum Tercapai				277009,86 M3		Dinas Kehutanan
		Persentase Kerusakan Hutan perahun	Persentase	16,2		0,03		0,09	Belum Tercapai				16,2 %		Dinas Kehutanan
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	283		647		228,47	Melampaui				210596 Ton		Dinas Kehutanan
49	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai Hilirisasi Peternakan	Rp	37059609113	287.919.479.265,0	36.529.055.440	126.267.928.313,0	98,57	Belum Tercapai				38617836192 Rp	103.053.364.146,4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan	Rp.	463034340435		38.081.163.500		8,22	Belum Tercapai				0 Rp	841.642.122.548,0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Nilai Hilirisasi Produk Perkebunan	Rp.	7.000.000.000		7.408.991.000		105,84	Melampaui				0 Rp		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
50	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan konsumsi dan non konsumsi	Ton	5436,2		5911,92		108,75	Melampaui				5544,1 Ton	7.812.513.513,9	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pembinaan mutu produk perikanan	Persentase	80	2.574.815.266,0	80	1.345.819.096,0	100,00	Sesuai	1. Tidak adanya sertifikat kesehatan (Health certificate) dikamarena adanya pelimpahan kewenangan ke UPT BKIPM KKP berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2014. 2. Peralatan pengujian banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 3. ketersediaan anggaran operasional pengujian sangat minim	1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan pelaku usaha dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pembinaan ke pelaku usaha. 2. Perlu nya Alokasi anggaran dalam rangka perbaikan peralatan yang rusak dan operasional pengujian	Perlu nya peningkatan inovasi pelayanan terhadap pelaku usaha.	100 %		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Hilirisasi Produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi	Rp. Miliar	311,06		355,05		114,14	Melampaui				317,28 Milyar		Dinas Kelautan dan Perikanan
51	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	Persentase	6	13.913.048.812,6	12	10.711.860.757,0	200,00	Melampaui				7 %	40.284.423.382,6	Dinas Perindustrian
52	PROGRAM PEMBANGUNAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	\$ US	1584085320	678.875.000,0	2.358.936.319	537.540.988,0	148,91	Melampaui				0 \$ US	1.981.755.000,0	Dinas Perdagangan
	Tujuan 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	72,63									72,84		
	Sasaran 11: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi Penurunan emisi GRK	Juta Ton CO2Eq	1,2	97.256.859.945,0								1,347		
53	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Persentase	100		100		100,00	Sesuai				100 %	765.059.300,0	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase tanggap darurat bencana yg tertangani (Prioritas)	Persentase	100		94,21	8.035.051.682,0	94,21	Belum Tercapai				100 %	140.503.708.774,0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Aparat kesiapsiagaan bencana yg terlatih	Persentase	2,0		94,64		4.732,00	Melampaui				100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase dokumen kebencanaan sampai dengan sah/legat yang tersedia	Persentase	100		95,51		95,51	Belum Tercapai				100 %		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
54	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan pemanfaatan ruang	rasio	0,9	5.001.420.000,0	0,9	1.559.187.945,0	100,00	Sesuai				1	11.426.195.800,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
55	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAS	Jumlah DAS yang direhabilitasi	Das	2	2.725.940.000,0	2	5.429.685.098,0	100,00	Sesuai				6 DAS	7.877.820.000,0	Dinas Kehutanan
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	Persentase	4,59	2.410.295.500,0	6,93	1.952.783.949,0	150,98	Melampaui	Data yang dibutuhkan diambil dari kab/kota karena provinsi belum memiliki TPA regional dan IPAL dengan penangkap Aksara di kab/kota dalam pengisian pengelolaan persampahan dan potensi penurunan emisi GRK sehingga kurangnya data yang terinput dalam aplikasi; serta Masih ada kab/kota yang tidak menginput ke aplikasi SIPSN dan Aksara	Melakukan rapat koordinasi dengan kab/kota terkait dengan pengisian aplikasi SIPSN dan Aksara dan pemenuhan kebutuhan data yang dibutuhkan; Merekap data sampah yang terkelola dari aplikasi SIPSN dan dimasukkan dalam aplikasi Aksara untuk melihat potensi penurunan emisi GRK	Memasukkan saran untuk membangun TPA regional yang mempunyai penangkap metan; Melakukan rapat koordinasi dengan kab/kota untuk mengisi aplikasi SIPSN dengan lengkap sehingga dapat direkap kegiatan pengelolaan persampahan dan dimasukkan ke dalam Aplikasi Aksara; Membuat surat edaran ke kab/kota untuk mengumpulkan laporan penurunan emisi GRK dengan target yang telah ditentukan di RPJMD dengan rujukan dari kegiatan pengelolaan persampahan di aplikasi SIPSN	5,4 Ton penurunan emisi Co2 eq	7.216.040.654,0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Visi/Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2022		Capaian Kinerja Program dan Pendanaan 2022		persentas capaian	Predikat Kinerja 2022 (Interpretasi)	Faktor Pendorong dan kendala dalam pelaksanaan di Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Capaian	Rp			Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian	Langkah-langkah Pencapaian	Rekomendasi Pelaksanaan Berikutnya	Target	Rp	
1	2	3	4	8		9				10			13		14
57	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B	Cakupan limbah yang dikelola	Persentase	97.5	6,700,000,000.0	75	5,171,542,716.0	76.92	Belum Tercapai	1. Perlu disusun kebijakan daerah untuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kebijakan teknis pengelolaan limbah B3 pada level pemerintah di lingkungan perkantoran dan masyarakat pada level rumah tangga. 2. Dalam hal pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Provinsi Sulawesi Selatan perlu sinergitas dan kerjasama yang koordinatif dan komprehensif antara pemrakarsa usaha dan atau kegiatan, instansi Pembina Lingkungan Hidup baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta seluruh instansi dan stake holder terkait agar dapat saling mendukung dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan bebas bahan berbahaya dan beracun. 3. Perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan, penguatan kapasitas dan sertifikasi kepada seluruh SDM pengelola limbah B3 pada pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sehingga pengelolaan limbah B3 yang dilakukan benar-benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Perlu sistem pelaporan data yang terintegrasi, satu pintu, terkoneksi dengan DLH Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait dan dapat diakses oleh semua yang berkepentingan terutama pemegang kebijakan yang memuat data pemrakarsa usaha, jenis izin, pengelolaan limbah B3, di termasuk pengawasan yang telah dilakukan serta informasi lain yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan/ lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangunan bidang lingkungan hidup. 5. Perlu dilakukan kajian dan inisiasi pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 di Sulawesi Selatan seperti Pengumpulan, Pengolahan dan Pemulihan serta Pemanfaat	1. Perlu disusun kebijakan daerah untuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kebijakan teknis pengelolaan limbah B3 pada level pemerintah di lingkungan perkantoran dan masyarakat pada level rumah tangga. 2. Dalam hal pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Provinsi Sulawesi Selatan perlu sinergitas dan kerjasama yang koordinatif dan komprehensif antara pemrakarsa usaha dan atau kegiatan, instansi Pembina Lingkungan Hidup baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta seluruh instansi dan stake holder terkait agar dapat saling mendukung dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan bebas bahan berbahaya dan beracun. 3. Perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan, penguatan kapasitas dan sertifikasi kepada seluruh SDM pengelola limbah B3 pada pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sehingga pengelolaan limbah B3 yang dilakukan benar-benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Perlu sistem pelaporan data yang terintegrasi, satu pintu, terkoneksi dengan DLH Kabupaten/Kota serta Stake Holder terkait dan dapat diakses oleh semua yang berkepentingan terutama pemegang kebijakan yang memuat data pemrakarsa usaha, jenis izin, pengelolaan limbah B3, di termasuk pengawasan yang telah dilakukan serta informasi lain yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan/ lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangunan bidang lingkungan hidup. 5. Perlu dilakukan kajian dan inisiasi pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 di Sulawesi Selatan seperti Pengumpulan, Pengolahan dan Pemulihan serta Pemanfaat	98 %	23,130,315,657.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	
58	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Penggunaan Gas Rumah Tangga	Persentase	93.4	632,119,742.0	98.69	1,600,271,516.0	105.66	Melampaui	perlu penyusunan perencanaan teknis yang lebih matang dan mempercepat proses pelaksanaan dalam pencapaian target, melakukan pemetaan lokasi yang menjadi prioritas	Tetap melanjutkan kegiatan konservasi energi ( bio gas ) untuk msyarakat	95 %	2,195,762,094.0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
59	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Produksi garam rakyat	Ton	47500		2,500		5.26	Belum Tercapai	1. Faktor cuaca sehingga menghambat proses capaian produksi Garam 2. Tingginya curah hujan yang menyebabkan salinitas air berkurang.	1. penerapan metode tunnel/ rumah prisma dalam kegiatan produksi garam	1. Perlu peningkatan SDM Petani garam dalam penerapan teknologi pembuatan garam bebas cuaca. 2. Perlu dukungan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana usaha garam.	48450 Ton	41,608,300,000.0	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan	Persentase	74.08	13,211,000,000.0	48.48	13,532,203,193.0	55.44	Belum Tercapai	1. Terkendala persyaratan administrasi proposal yang tidak memenuhi kriteria dan dobel bantuan 2. ketidak sesuaian lokasi yang diusulkan dengan yang di persyaratan	1. melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok 2. melakukan identifikasi dan verifikasi awal terhadap kelompok penerima bantuan	1. Perlu peningkatan dalam pelaksanaan identifikasi dan verifikasi yang lebih selektif.	100 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Persentase	67.3		67.3		100.00	Sesuai				67.31 %	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
60	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	88.73	10,399,882,393.0	95.15	4,134,686,995.0	107.24	Melampaui			89.85 %	32,560,835,612.3	Dinas Kelautan dan Perikanan	
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase	30.80		30		97.40	Belum Tercapai	Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya ketersediaan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan	Peningkatan pelayanan angkutan umum Perkotaan yang inklusif dan memadai	Penambahan Koridor Teman BUS	0 %	26,245,597,210.0	Dinas Perhubungan
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persentase	21		21		100.00	Sesuai	Jumlah angkutan umum darat tidak mampu menampung jumlah seluruh penumpang, khususnya pada musim mudik seperti saat hari raya	Penyediaan sarana pengangkutan oleh penyedia jasa transportasi darat	Penyediaan sarana pengangkutan oleh penyedia jasa transportasi darat	0 %	-	Dinas Perhubungan
		Jumlah penyelenggaraan lalu lintas pada ruas jalan provinsi	Jumlah	45		45		100.00	Sesuai	Kurangnya Anggaran dalam Pengadaaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Peningkatan Jumlah Fasilitas keselamatan /Rambu Rambu Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Penambahan Jumlah fasilitas Keselamatan Jalan di 72 Ruas Jalan Provinsi	0 Ruas	-	Dinas Perhubungan
		Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik	Persentase	22	7,105,000,000.0	4	3,851,291,912.0	18.16	Belum Tercapai	Kurangnya Anggaran dalam Pengadaan serta Pemeliharaan sarana LLAJ	Peningkatan Jumlah Fasilitas keselamatan /Rambu Rambu Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Peningkatan Persentase Penganggaran Pengadaan dan Sarana LLAJ	0 %	-	Dinas Perhubungan
		Jumlah penumpang melalui terminal Tipe B per tahun	Orang	499277		499,277		100.00	Sesuai	peningkatan jumlah penumpang belum diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang baik	Telah dikelolanya 4 Terminal dari 16 terminal kewenangan Provinsi	Penyediaan sarana dan Prasarana Terminal Tipe B yang Memadai	0 Orang	-	Dinas Perhubungan
		Jumlah Terminal Bis terkelola	Terminal	9		9		100.00	Sesuai	Pengalihan pengelolaan terminal tipe B kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dikordinasikan lebih lanjut, terutama terkait dengan kesediaan pemerintah daerah untuk menyerahkan pengelolaan terminal tipe B yang ada dalam pengusaannya.	Progres P3D Terminal Tipe B dari 16 Terminal telah diserahkan 7 Terminal	Koordinasi Kab/Kota dalam Percepatan P3D Terminal Tipe B sesuai Kewenangan termasuk Progres P3D terminal Malengkeri Kota Makassar	0 Terminal	-	Dinas Perhubungan
62	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	Persentase	73	2,100,450,000.0	54.48	1,036,783,297.0	74.63	Belum Tercapai	Rendahnya Kapasitas Pemerintah Daerah, Rendahnya Kepedulian Publik, Trend Komposisi Sampah Plastik, Peran dan Tanggungjawab Produser (belum mandatory) dan Penegakan Hukum yang Masih Lemah	melakukan edukasi, sosialisasi dan pembinaan kepada Kabupaten Kota Dan masyarakat tentang cara-cara pengurangan dan penanganan sampah, sehingga memotivasi masyarakat untuk memilah sampahnya dari rumah.	- Diharapkan kepada 24 kabupaten/kota setiap tahunnya melaporkan neraca sampah secara berkala ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas PengelolaanLingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.	74 %	3,574,165,512.0	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN 2

*Keterkaitan Sasaran Pembangunan Nasional terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023*

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
1.	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata Kelola penyenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Meningkatnya pelayanan publik melalui perbaikan tata Kelola dan birokrasi	Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Provinsi			
		Berkembangnya inovasi dalam penyenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Pelayanan Publik			
2	Penguatan	Meningkatkan	Indeks Williamson	Memperkuat	Meningkatnya	Rumah tangga yang

LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
	infrastruktur wilayah	pemerataan infrastruktur wilayah		Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan	Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar	menempati hunian layak dan terjangkau (%)
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur	Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)		Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif,%); peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
3	Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara	PDRB Perkapita ADHB Tingkat	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi dan	PDRB KTI

## LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
		merata	Kemiskinan	kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sector unggulan daerah	Tingkat pengangguran terbuka			
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	Rasio Gini	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2)	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Persentase penduduk miskin KTI (%)
5	Akselerasi pembangunan	Meningkatkan kualitas SDM yang	IPM	Meningkatkan SDM Berkualitas	Meningkatnya pemerataan	(a) Nilai rata-rata hasil PISA

LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
	Sumber Daya Manusia	kompetitif, inklusif dan berkarakter		dan Berdaya Saing (PN 3)	layanan Pendidikan Berkualitas	(membaca, matematika, sains), (b) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (c) harapan lama sekolah
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan	Indeks Pendidikan		Terpenuhinya layanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan	(a) Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan			

LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
						<p>pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatkan jumlah Kab/Kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kab/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk &gt;18</p>

LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
						tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender		Meningkatnya kualitas anak, perempuan	(a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
		Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai	Angka kriminalitas	Revolusi Mental dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama

## LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
		agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat		Kebudayaan (PN 4)	masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	

## LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	(a) Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan.
		Meningkatnya hilirisasi ekonomi sector unggulan daerah	Produktivitas Total Daerah			Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
						pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB).
7	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara	IKLH	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

## LAMPIRAN 2

Prioritas Pembangunan Daerah				Prioritas Pembangunan Nasional		
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional
		berkelanjutan		ketahanan bencana,		
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Potensi penurunan emisi GRK (Juta Tom CO <sub>2</sub> Eq)	dan perubahan iklim (PN6)	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	(a) Persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK

Sumber : Peraturan Gubernur No.2 Tahun 2022 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023





NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	3	4	5	8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		17	18
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	% % %	80.0 90.0 90.0	8,869,517,933.12   	5,587,721,788.0   	0.0 0.0 0.0	1,165,210,950.0   	0.0 0.0 0.0	2,163,043,952.0   	0.0 0.0 0.0	3,035,858,567.0   	80.0 90.0 90.0	4,733,429,019.0   	80.0 90.0 90.0	4,733,429,019.0   	100.0 100.0 100.0	84.71   		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi  Jumlah data dan inform Rekomendasi	5.0 8.0 7.0	1,975,716,218.63   	1,242,904,638.0   	0.0 0.0 0.0	76,192,350.0   	0.0 0.0 0.0	250,762,326.0   	0.0 0.0 0.0	510,658,154.0   	5.0 8.0 7.0	989,524,155.0   	5.0 8.0 7.0	989,524,155.0   	100.0 100.0 100.0	79.61   		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD RPJMD dan RKPd	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	1.0	210,000,000.0	128,052,800.0	0.0	0.0	0.0	13,727,400.0	0.0	43,172,778.0	1.0	98,556,630.0	1.0	98,556,630.0	100.0	76.97		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1.0	193,960,100.0	177,720,100.0	0.0	0.0	0.0	15,934,800.0	0.0	57,873,514.0	1.0	131,369,388.0	1.0	131,369,388.0	100.0	73.92		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	Rekomendasi	4.0	341,000,000.0	257,495,568.0	0.0	14,591,600.0	0.0	64,031,284.0	0.0	88,467,876.0	4.0	212,345,913.0	4.0	212,345,913.0	100.0	82.47		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD RPJMD dan RKPd	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi	3.0	602,000,000.0	282,445,000.0	0.0	22,847,350.0	0.0	70,380,350.0	0.0	147,800,478.0	3.0	235,054,992.0	3.0	235,054,992.0	100.0	83.22		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen  Dokumen	1.0 2.0	418,756,118.63  	224,351,170.0  	0.0 0.0	16,759,400.0  	0.0 0.0	30,491,992.0  	0.0 0.0	69,075,392.0  	1.0 2.0	176,033,968.0  	1.0 2.0	176,033,968.0  	100.0 100.0	78.46  		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi	4.0	210,000,000.0	172,840,000.0	0.0	21,994,000.0	0.0	56,196,500.0	0.0	104,268,116.0	4.0	136,163,264.0	4.0	136,163,264.0	100.0	78.78		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	13.16		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	Rekomendasi  Data dan Informasi Rekomendasi	7.0 10.0 11.0	1,877,983,218.80   	1,207,388,500.0   	0.0 0.0 0.0	86,907,200.0   	0.0 0.0 0.0	312,470,097.0   	0.0 0.0 0.0	567,452,810.0   	7.0 10.0 11.0	1,010,059,777.0   	7.0 10.0 11.0	1,010,059,777.0   	100.0 100.0 100.0	83.66   		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD RPJMD dan RKPd	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rekomendasi	3.0	205,416,213.20	156,156,900.0	0.0	13,911,000.0	0.0	48,755,180.0	0.0	76,673,908.0	3.0	129,446,081.0	3.0	129,446,081.0	100.0	82.89		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Perekonomian	Dokumen	4.0	211,207,383.20	183,922,900.0	0.0	12,635,500.0	0.0	28,101,309.0	0.0	60,091,005.0	4.0	152,653,958.0	4.0	152,653,958.0	100.0	83.0		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	3	4	5	8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		17	18
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Rekomendasi	4.0	447,614,983.20	265,222,400.0	0.0	16,698,400.0	0.0	58,330,401.0	0.0	140,735,537.0	4.0	234,627,820.0	4.0	234,627,820.0	100.0	88.46		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD RPJMD dan RKPd	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rekomendasi	6.0	207,491,913.20	151,785,100.0	0.0	13,405,600.0	0.0	34,733,800.0	0.0	66,726,923.0	6.0	123,451,448.0	6.0	123,451,448.0	100.0	81.33		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang SDA	Dokumen	4.0	216,856,873.0	171,943,300.0	0.0	14,524,800.0	0.0	68,640,300.0	0.0	90,038,996.0	4.0	147,053,437.0	4.0	147,053,437.0	100.0	85.52		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Rekomendasi	5.0	589,395,853.0	278,357,900.0	0.0	15,731,900.0	0.0	73,909,107.0	0.0	133,186,441.0	5.0	222,827,033.0	5.0	222,827,033.0	100.0	80.05		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	13.92		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Wilayah Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	Rekomendasi  data dan inform Rekomendasi	6.0 25.0 6.0	5,015,818,495.69	3,137,428,650.0	0.0 0.0 0.0	1,002,111,400.0	3.0 0.0 3.0	1,599,811,529.0	0.0 0.0 0.0	1,957,747,603.0	3.0 25.0 3.0	2,733,845,087.0	6.0 25.0 6.0	2,733,845,087.0	100.0 100.0 100.0	87.14		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD RPJMD dan RKPd	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	Rekomendasi	3.0	350,000,000.0	202,040,800.0	0.0	3,000,000.0	0.0	13,213,100.0	0.0	46,967,896.0	3.0	146,025,555.0	3.0	146,025,555.0	100.0	72.28		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Bidang Infrastruktur	Dokumen	3.0	200,000,000.0	155,620,900.0	0.0	4,000,000.0	1.0	11,788,500.0	1.0	83,451,336.0	1.0	134,620,796.0	3.0	134,620,796.0	100.0	86.51		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Rekomendasi	3.0	3,360,972,284.37	2,174,150,250.0	0.0	983,111,400.0	3.0	1,538,994,729.0	0.0	1,640,373,617.0	0.0	1,948,870,236.0	3.0	1,948,870,236.0	100.0	89.64		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah RPJPD RPJMD dan RKPd	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Rekomendasi	3.0	465,000,000.0	196,202,800.0	0.0	4,000,000.0	3.0	12,023,600.0	0.0	68,014,847.0	0.0	174,385,600.0	3.0	174,385,600.0	100.0	88.88		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Dokumen	3.0	140,000,000.0	129,711,500.0	0.0	4,000,000.0	1.0	11,805,500.0	1.0	38,715,696.0	1.0	109,541,143.0	3.0	109,541,143.0	100.0	84.45		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Rekomendasi	3.0	499,846,211.32	279,702,400.0	0.0	4,000,000.0	0.0	11,986,100.0	0.0	80,224,211.0	3.0	220,401,757.0	3.0	220,401,757.0	100.0	78.80		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	13.90		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP</b> <b>Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah</b> <b>Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik</b>	% % %	100.0 100.0 100.0	##### #####	37,426,539,754.0	0.0 6.80 25.0	5,038,237,281.0	0.0 15.80 25.0	16,699,608,987.0	0.0 8.20 25.0	26,269,865,920.0	100.0 70.29 25.0	36,861,733,057.0	100.0 101.09 100.0	36,861,733,057.0	100.0 101.09 100.0	98.49		
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	100.0	872,674,629.35	693,963,900.0	20.0	95,396,375.0	20.0	196,871,375.0	30.0	311,792,710.0	30.0	637,201,006.0	100.0	637,201,006.0	100.0	91.82		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2.0	210,000,000.0	60,701,000.0	0.0	17,823,100.0	0.0	35,639,700.0	1.0	48,964,896.0	1.0	58,884,844.0	2.0	58,884,844.0	100.0	97.01		
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Dokumen	4.0	190,000,000.0	111,260,300.0	1.0	21,311,600.0	1.0	21,311,600.0	1.0	65,311,100.0	2.0	108,351,174.0	5.0	108,351,174.0	125.0	97.39		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	Dokumen	8.0	472,674,629.35	522,002,600.0	5.0	56,261,675.0	1.0	139,920,075.0	1.0	197,516,714.0	1.0	469,964,988.0	8.0	469,964,988.0	100.0	90.03		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																108.33	31.60		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100.0	38,283,781,907.0	29,364,475,106.0	25.0	4,156,351,301.0	25.0	14,535,243,522.0	25.0	22,260,725,450.0	25.0	29,064,428,904.0	100.0	29,064,428,904.0	100.0	98.98		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKP/DAERAH TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	3	4	5	8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		17	18
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	%	100.0	37,781,347,247.0	28,954,033,106.0	25.0	4,087,879,401.0	25.0	14,376,373,578.0	25.0	21,991,286,234.0	25.0	28,676,290,780.0	100.0	28,676,290,780.0	100.0	99.04		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Jasa Administrasi Keuangan Supervisi SPJ Bulanan Layanan Jasa Administrasi Keuangan SPP/SPM Gaji Layanan Jasa Administrasi Keuangan SPP/SPM Kegiatan	Dokumen Dokumen Kegiatan	12.0 14.0 17.0	381,226,736.0	307,314,000.0	3.0 3.0 4.0	49,596,000.0	3.0 5.0 5.0	105,350,044.0	3.0 3.0 4.0	193,003,216.0	3.0 3.0 4.0	290,428,500.0	12.0 14.0 17.0	290,428,500.0	100.0 100.0 100.0	94.51		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	laporan	1.0	121,207,924.0	103,128,000.0	0.0	18,875,900.0	0.0	53,519,900.0	0.0	76,436,000.0	1.0	97,709,624.0	1.0	97,709,624.0	100.0	94.75		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	32.03		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan</b>	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>129,741,524.0</b>	<b>73,837,500.0</b>	<b>25.0</b>	<b>18,434,200.0</b>	<b>25.0</b>	<b>36,864,580.0</b>	<b>25.0</b>	<b>55,016,800.0</b>	<b>25.0</b>	<b>73,395,849.0</b>	<b>100.0</b>	<b>73,395,849.0</b>	<b>100.0</b>	<b>99.40</b>		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan	2.0	18,021,500.0	15,775,500.0	1.0	3,929,500.0	0.0	7,864,180.0	1.0	11,739,200.0	0.0	15,638,300.0	2.0	15,638,300.0	100.0	99.13		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	Laporan	3.0	111,720,024.0	58,062,000.0	0.0	14,504,700.0	1.0	29,000,400.0	1.0	43,277,600.0	1.0	57,757,549.0	3.0	57,757,549.0	100.0	99.48		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	49.65		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN</b>	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>629,828,048.0</b>	<b>403,733,100.0</b>	<b>25.0</b>	<b>46,534,360.0</b>	<b>25.0</b>	<b>76,012,280.0</b>	<b>25.0</b>	<b>215,633,760.0</b>	<b>25.0</b>	<b>400,953,334.0</b>	<b>100.0</b>	<b>400,953,334.0</b>	<b>100.0</b>	<b>99.31</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Pasang	210.0	188,936,500.0	150,067,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.0	149,850,555.0	210.0	149,850,555.0	100.0	99.86		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Pegawai	210.0	134,189,024.0	78,497,500.0	50.0	19,607,700.0	50.0	39,199,480.0	50.0	58,320,780.0	60.0	78,421,380.0	210.0	78,421,380.0	100.0	99.90		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	%	100.0	173,592,324.0	19,617,300.0	25.0	1,900,200.0	25.0	3,795,720.0	25.0	8,060,820.0	25.0	19,190,688.0	100.0	19,190,688.0	100.0	97.83		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Pegawai	360.0	133,110,200.0	155,550,800.0	210.0	25,026,460.0	150.0	33,017,080.0	0.0	149,252,160.0	0.0	153,490,711.0	360.0	153,490,711.0	100.0	98.68		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	24.77		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>1,740,979,308.0</b>	<b>2,164,298,900.0</b>	<b>25.0</b>	<b>268,775,155.0</b>	<b>25.0</b>	<b>558,891,461.0</b>	<b>25.0</b>	<b>1,092,856,535.0</b>	<b>25.0</b>	<b>2,158,274,467.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,158,274,467.0</b>	<b>100.0</b>	<b>99.72</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	Unit	12.0	150,054,524.0	148,332,500.0	5.0	34,996,040.0	4.0	72,507,100.0	4.0	109,186,660.0	3.0	148,080,660.0	16.0	148,080,660.0	133.33	99.83		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	14.0	153,956,336.0	216,881,000.0	5.0	31,997,920.0	4.0	74,587,080.0	4.0	93,206,080.0	5.0	216,563,520.0	18.0	216,563,520.0	128.57	99.85		
	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	%	100.0	135,777,000.0	39,255,500.0	0.0	9,756,000.0	0.0	12,756,000.0	0.0	26,692,000.0	0.0	39,094,000.0	0.0	39,094,000.0	0.0	99.59		
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	400.0	304,995,024.0	200,703,800.0	83.0	48,314,280.0	86.0	98,421,681.0	95.0	148,500,981.0	145.0	200,121,031.0	409.0	200,121,031.0	102.25	99.71		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali	80.0	996,196,424.0	1,559,126,100.0	20.0	143,710,915.0	20.0	300,619,600.0	30.0	715,270,814.0	30.0	1,554,415,256.0	100.0	1,554,415,256.0	125.0	99.70		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																97.83	19.95		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>1,080,565,700.0</b>	<b>1,085,227,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,639,160.0</b>	<b>25.0</b>	<b>3,639,160.0</b>	<b>25.0</b>	<b>230,184,721.0</b>	<b>50.0</b>	<b>973,476,046.0</b>	<b>100.0</b>	<b>973,476,046.0</b>	<b>100.0</b>	<b>89.70</b>		
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud	Jenis	1.0	108,509,100.0	54,040,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,878,025.0	0.0	3,878,025.0	0.0	7.18			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100.0	693,427,600.0	1,031,187,000.0	0.0	3,639,160.0	25.0	3,639,160.0	50.0	230,184,721.0	25.0	969,598,021.0	100.0	969,598,021.0	100.0	94.03		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																50.0	25.30		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>24,000,000.0</b>	<b>965,168,128.0</b>	<b>25.0</b>	<b>103,475,471.0</b>	<b>25.0</b>	<b>408,097,420.0</b>	<b>25.0</b>	<b>566,891,435.0</b>	<b>25.0</b>	<b>918,536,792.0</b>	<b>100.0</b>	<b>918,536,792.0</b>	<b>100.0</b>	<b>95.17</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12.0	19,000,000.0	163,936,500.0	3.0	2,685,471.0	3.0	153,195,449.0	3.0	155,797,974.0	3.0	157,838,523.0	12.0	157,838,523.0	100.0	96.28		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1.0	5,000,000.0	801,231,628.0	0.0	100,790,000.0	0.0	254,901,971.0	1.0	411,093,461.0	0.0	760,698,269.0	1.0	760,698,269.0	100.0	94.94		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2022)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	3	4	5	8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%		17	18
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	47.81		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>%</b>	<b>100.0</b>	<b>1,963,178,192.0</b>	<b>2,675,836,120.0</b>	<b>25.0</b>	<b>345,631,259.0</b>	<b>25.0</b>	<b>883,989,189.0</b>	<b>25.0</b>	<b>1,536,764,509.0</b>	<b>25.0</b>	<b>2,635,466,659.0</b>	<b>100.0</b>	<b>2,635,466,659.0</b>	<b>100.0</b>	<b>98.49</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan Jumlah kendaraan jabatan/ dinas yang dipelihara	Unit Unit Unit	5.0 16.0 20.0	490,106,024.0 644,590,000.0	644,590,000.0	1.0 8.0 5.0	93,568,680.0 0.0 5.0	0.0 0.0 5.0	223,096,585.0 0.0 5.0	3.0 3.0 5.0	365,264,485.0 0.0 5.0	2.0 7.0 8.0	619,684,285.0 0.0 5.0	6.0 18.0 23.0	619,684,285.0 0.0 5.0	120.0 112.50 115.0	96.14 0.0 0.0		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 2 yang terbayarkan	Unit Unit Unit	5.0 2.0 4.0	192,877,524.0 574,858,560.0	574,858,560.0	2.0 1.0 4.0	72,149,411.0 0.0 0.0	2.0 0.0 0.0	207,248,315.0 0.0 0.0	2.0 1.0 0.0	347,242,795.0 0.0 2.0	2.0 0.0 2.0	563,141,195.0 0.0 6.0	8.0 2.0 6.0	563,141,195.0 0.0 150.0	160.0 100.0 150.0	97.96 0.0 0.0		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Jenis	1.0	162,771,024.0	103,964,500.0	0.0	0.0	1.0	1,966,320.0	1.0	50,695,320.0	0.0	102,449,000.0	2.0	102,449,000.0	200.0	98.54		
	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Gedung	2.0	672,535,596.0	549,836,560.0	0.0	33,042,760.0	0.0	84,298,020.0	1.0	214,229,160.0	1.0	548,952,940.0	2.0	548,952,940.0	100.0	99.84		
	PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Jenis	10.0	444,888,024.0	802,586,500.0	5.0	146,870,408.0	5.0	367,379,949.0	5.0	559,332,749.0	5.0	801,239,239.0	20.0	801,239,239.0	200.0	99.83		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																139.72	19.69		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																			
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>																			
	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah (Prioritas)</b>	<b>%</b>	<b>3.0</b>	<b>6,405,000,000.0</b>	<b>8,602,658,540.0</b>	<b>0.0</b>	<b>106,308,300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>780,984,650.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,885,001,686.0</b>	<b>9.43</b>	<b>7,141,187,252.0</b>	<b>9.43</b>	<b>7,141,187,252.0</b>	<b>314.33</b>	<b>83.01</b>		
	<b>5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>2.0</b>	<b>1,250,000,000.0</b>	<b>1,094,736,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22,431,700.0</b>	<b>0.0</b>	<b>75,555,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>416,676,584.0</b>	<b>2.0</b>	<b>762,989,738.0</b>	<b>2.0</b>	<b>762,989,738.0</b>	<b>100.0</b>	<b>69.70</b>		
	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rekomendasi	1.0	750,000,000.0	833,107,200.0	0.0	10,967,500.0	0.0	46,227,000.0	0.0	315,167,392.0	1.0	517,086,486.0	1.0	517,086,486.0	100.0	62.07		
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Rekomendasi	1.0	275,000,000.0	261,629,300.0	0.0	11,464,200.0	0.0	29,328,800.0	0.0	101,509,192.0	1.0	245,903,252.0	1.0	245,903,252.0	100.0	93.99		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	39.02		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>7.0</b>	<b>1,175,000,000.0</b>	<b>2,437,626,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>20,379,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>116,608,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>983,818,392.0</b>	<b>7.0</b>	<b>2,015,268,015.0</b>	<b>7.0</b>	<b>2,015,268,015.0</b>	<b>100.0</b>	<b>82.67</b>		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Rekomendasi	1.0	300,000,000.0	254,146,300.0	0.0	3,522,000.0	0.0	21,662,000.0	0.0	93,922,000.0	1.0	218,217,800.0	1.0	218,217,800.0	100.0	85.86		
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rekomendasi	5.0	275,000,000.0	1,937,183,200.0	0.0	5,757,200.0	0.0	61,647,400.0	0.0	784,027,400.0	5.0	1,583,899,659.0	5.0	1,583,899,659.0	100.0	81.76		
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Rekomendasi	1.0	325,000,000.0	246,297,300.0	0.0	11,100,600.0	0.0	33,298,600.0	0.0	105,868,992.0	1.0	213,150,556.0	1.0	213,150,556.0	100.0	86.54		
	<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>																100.0	28.24		
	<i>Predikat Kinerja</i>																			
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>8.0</b>	<b>1,830,000,000.0</b>	<b>3,714,460,940.0</b>	<b>0.0</b>	<b>45,496,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>387,654,200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,097,340,180.0</b>	<b>8.0</b>	<b>3,156,429,553.0</b>	<b>8.0</b>	<b>3,156,429,553.0</b>	<b>100.0</b>	<b>84.98</b>		
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rekomendasi	1.0	150,000,000.0	494,434,500.0	0.0	13,240,000.0	0.0	256,081,000.0	0.0	299,611,392.0	1.0	442,447,132.0	1.0	442,447,132.0	100.0	89.49		





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453486, Fax 453869,  
Makassar 90231

---

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Andi Darmawan Bintang, M.Dev, Plg**  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Andi Sudirman Sulaiman, ST**  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

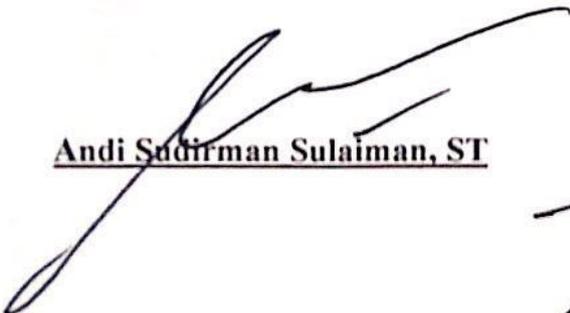
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

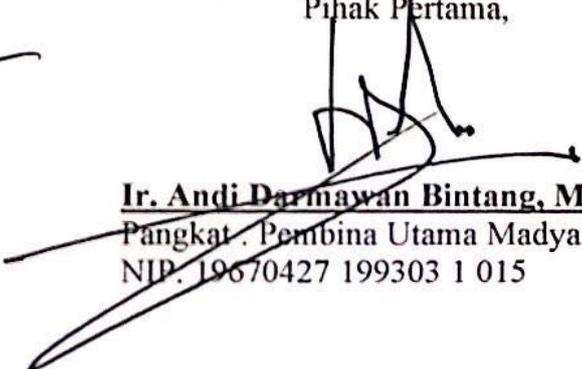
Pihak Kedua akan melakukan evaluasi setiap triwulan dan jika dalam 2 (dua) triwulan tidak mencapai target, maka Pihak Pertama bersedia dievaluasi.

Makassar, 16 Maret 2022

Pihak Kedua,

  
Andi Sudirman Sulaiman, ST

Pihak Pertama,

  
Ir. Andi Darmawan Bintang, MDevPlg  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19670427 199303 1 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	3	4	5
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Sulawesi Selatan	98.25%
		Persentase capaian kinerja program prioritas pembangunan daerah (Outcome minimal 75%)	92.5%
		Persentase kesesuaian prioritas pembangunan provinsi sulawesi selatan terhadap prioritas nasional	100.0%
2	Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk inovasi daerah	10%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	96%
		Nilai SAKIP OPD	81
		Persentase Temuan Material	0.06%

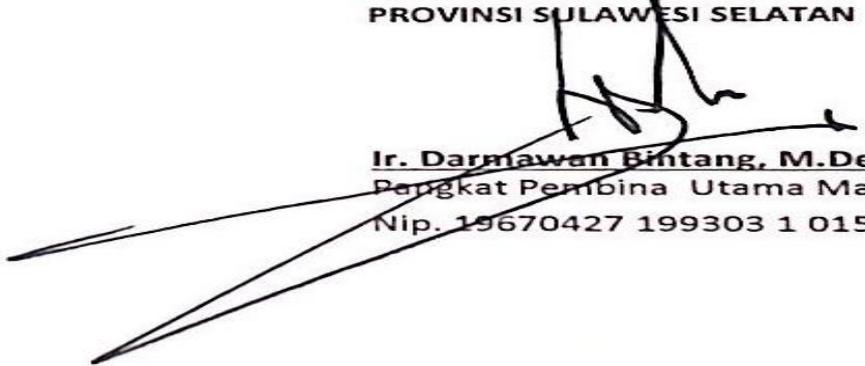
PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp12,188,621,292.00	APBD
2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp5,682,261,750.00	APBD
3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp9,064,713,740.00	APBD
4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp33,840,386,246.00	APBD
<b>TOTAL</b>	<b>Rp60,775,983,028.00</b>	

Makassar, 2022

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

  
Andi Sudirman Sulaiman

KEPALA BAPPELITBANGDA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

  
Ir. Darmawan Bintang, M.Dev, Plg  
Pangkat Pembina Utama Madya  
Nip. 19670427 199303 1 015